

**ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN  
SEKTOR UNGGULAN EKONOMI DI KABUPATEN WAJO  
(PENDEKATAN MODEL BASIS EKONOMI DAN DAYA  
SAING EKONOMI)**



**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana ekonomi  
Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Alauddin Makassar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh :  
**ASHABUL KAHFI MUHRISYA**  
**90300115003**

**PRODI ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ashabul Kahfi Muhrisya

Nim : 90300115003

Jurusan/ Program Studi : Ilmu Ekonomi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)”** adalah karya ilmiah saya sendiri dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat dan pasal 70).

Gowa, 18 NOVEMBER 2019

Yang membuat pernyataan,

  
**Ashabul Kahfi Muhrisya**  
**NIM: 90300115003**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ☎ (0411) 864924, Fax. 864923  
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ☎ 424835, Fax424836

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi yang berjudul *"Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi) "*, yang disusun oleh **Ashabul Kahfi Muhrisyah, NIM 90300115003**, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 13 November 2019 bertepatan dengan 16 Rabi'ul-Awal 1441, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Samata-Gowa, 13 November 2019

16 Rabi'ul-Awal 1441

**DEWAN PENGUJI**

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. (...)	(.....)
Penguji I	: Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Dr. Syaharuddin, M.Si.	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Dr. H. Mukhtar Lutfi, M.Pd.	(.....)
Pembimbing II	: Wardihan Sabar, SE., M.Si.	(.....)

Diketahui Oleh:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN

Alauddin Makassar



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

NIM 19061130 199303 1 003



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi setiap umat di seluruh alam. Skripsi ini berjudul **“Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)”** dan telah diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan sebelumnya.

Penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan adanya kerjasama, bantuan, arahan, bimbingan dan petunjuk-petunjuk dari berbagai pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu: Ibunda **Drg. Nur Asri Idrus M.Kes** dan Almarhum Ayahanda **Drs. Syarifuddin Hasan** yang paling berjasa atas apa yang sampai saat ini saya capai, telah mendidik saya, membesarkan saya dengan penuh kasih sayang, menyekolahkan saya sampai pada tingkat ini dan terus memberikan doanya. Karena itu, pada kesempatan ini penyusun juga ingin menyampaikan rasa terima kasih atas sumbangsih pemikiran, waktu, dan tenaga serta bantuan moril dan materil khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D selaku rektor UIN Alauddin Makassar dan para Wakil Rektor serta seluruh jajaran yang senantiasa

mencurahkan dedikasinya dengan penuh keikhlasan dalam rangka pengembangan mutu dan kualitas UIN Alauddin Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak Dr. Hasbiullah, SE., M.Si dan Dr. Alim Syariati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi dan bantuannya selama ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mukhtar Lutfi, M.Pd selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Wardihan Sabar, SE., M.Si selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktunya ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan serta saran yang sangat berguna bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si selaku penguji 1 dan Bapak Dr. Syaharuddin, M.Si selaku penguji 2 yang telah memberikan saran dan masukan ditengah kesibukannya demi kesempurnaan tulisan ini.
6. Bapak Dr. Siradjuddin, SE., M.Si selaku penguji komprehensif Ekonomi Makro dan Mikro, Bapak Akramunnas, SE., M.Si selaku penguji komprehensif Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan, dan Bapak Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag selaku penguji komprehensif Dirasah Islamiyah yang telah mengajarkan saya arti kesabaran dan teladan, serta pelajaran bahwa calon sarjana harus mempunyai senjata untuk bersaing di dunia kerja.
7. Bapak Dr. H. Abdul Wahab, SE., M.Si selaku pembimbing akademik saya yang selalu memberikan masukan dan saran serta arahan positif kepada saya.

8. Seluruh Dosen dan Staf pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
9. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo dan seluruh staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Wajo yang telah memberikan izin dan data untuk melengkapi kebutuhan data dalam penelitian ini.
10. Terima kasih untuk kakak saya Aulia Yusrisya, SKM dan Hajratul Aswad Fatrisya yang telah memberikan semangat, doa dan selalu mengajarkanku untuk tidak bosan menunggu dosen.
11. Kepada teman seperjuangan di bangku perkuliahan, Ilmu Ekonomi A angkatan 2015 semoga solidaritas dan keakraban kita kedepannya masih dapat tetap terjaga, dan ucapan terima kasih kepada Muh. Syawal, SE sebagai Ketua Tingkat yang telah sangat sabar mengawal dan membantu teman-teman melalui masa-masa sulit selama masa perkuliahan serta semua teman-teman kelas Ilmu Ekonomi A yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu.
12. Teruntuk “KACANG” yang selama ini telah menjadi teman terbaik saya selama kuliah (Reski Arya Kamandanu, SE, Irwandi, dan Arsuandy Mubarak) kuucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan, nasehat dan suka dukanya selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga dan akan tetap solid kedepannya.
13. Teruntuk “REBELS” yang selama ini telah menjadi Saudara tak sedarah (Wahyu, Nono, Rudi, Haldy, Syahrul, Ahsan) kuucapkan banyak terima kasih

atas segala bentuk bantuan dan masukannya selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagaimana mestinya.

14. Teruntuk Deni Andriani, SE saya ucapkan banyak terima kasih telah bersedia membantu, mengorbankan tenaga dan waktu, serta dukungannya selama proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai.
15. Teruntuk teman-teman di kompleks Perum. Green Hasanuddin yang telah bersedia menjadi tim hore yang selalu menghibur pada saat menghadapi kendala selama proses pengerjaan skripsi ini.
16. Ucapan terima kasih kepada teman-teman KKN Lumaring (Mutakbir, Rifai, Armi, Isa, Fiah, Imma) atas segala bentuk dukungan dan masukannya selama ini.
17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan sumbangsi berupa dukungan semangat kepada penulis.

Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak meskipun penulis menyadari penuh bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Dengan segenap kerendahan hati, penulis berharap semoga kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk penelitian yang lebih baik kedepannya, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Akhir kata penulis mengucapkan “WassalamuAlaikum. Wr. Wb”.

Gowa, 2019

Penulis

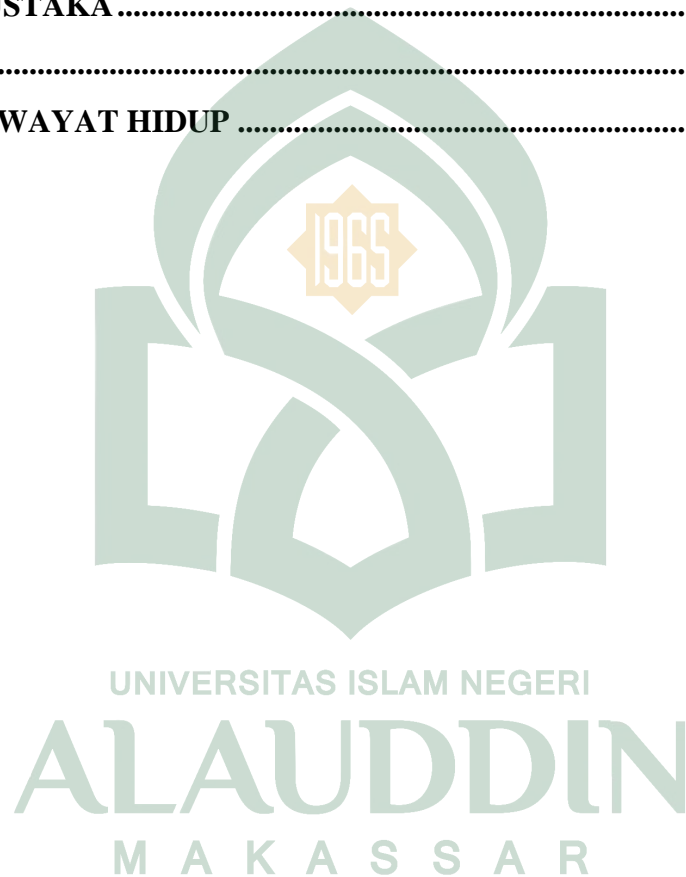
**Ashabul Kahfi Muhrisya**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR DIAGRAM.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-7</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8-24</b>
A. Landasan Teori.....	8
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	8
2. Teori Sektor Basis.....	14
3. Daya Saing Ekonomi.....	17
B. Penelitian Terdahulu .....	20
C. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25-33</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Pendekatan Penelitian .....	25
C. Jenis dan Sumber Data.....	25
D. Metode Pengumpulan Data.....	26
E. Teknik Analisis Data.....	26
1. Location Quotient.....	26
2. Model Rasio Pertumbuhan.....	27
3. Analisis Overlay.....	30
4. Dynamic Location Quotient.....	31
F. Definisi Operasional.....	33
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34-51</b>
A. Gambaran Umum Daerah Penelitian .....	34
1. Kondisi Geografis .....	34
2. Keadaan Penduduk.....	35



3. Pertumbuhan PDRB .....	36
B. Hasil dan Pembahasan.....	40
1. Analisis <i>Location Quotient</i> (LQ).....	40
2. Analisis <i>Dynamic Location Quotient</i> (DLQ) .....	43
3. Model Rasio Pertumbuhan (MRP).....	47
4. Analisis <i>Overlay</i> .....	50
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>54-56</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran.....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57-59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>60-68</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>69</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) .....	4
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2018 ..	35
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2017 .....	36
Tabel 4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 .....	38
Tabel 4.4	Hasil Perhitungan Indeks <i>Location Quotient (LQ)</i> Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017 .....	41
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan <i>Dynamic Location Quotient (DLQ)</i> Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017 .....	44
Tabel 4.6	Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017 .....	47
Tabel 4.7	Hasil Analisis <i>Overlay</i> Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017 .....	50



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Persen) .....	5
Diagram 4.1	PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah) ..	37



## ABSTRAK

**Nama : Ashabul Kahfi Muhrisya**  
**NIM : 90300115003**  
**Judul Skripsi : Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)**

---

Kondisi dan potensi ekonomi pada setiap daerah merupakan modal dasar dan faktor utama dalam penentuan strategi kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui potensi pertumbuhan pada setiap sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo, serta melihat tingkat daya saing pada setiap sektor tersebut guna mengetahui ke depannya sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah pada Kabupaten Wajo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder berupa runtun waktu (*time series*) dari PDRB Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Wajo periode 2013-2017. Teknik analisis data yang digunakan adalah *Location Quotient (LQ)*, *Dynamic Location Quotient (DLQ)*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis *Overlay*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi kontribusinya (LQ) terdapat empat sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; dan Sektor Perdagangan. Sedangkan dari sisi pertumbuhannya (MRP) terdapat sembilan sektor yang memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat kabupaten maupun di provinsi yaitu Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik dan Gas; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan; Sektor Akomodasi; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan; Sektor Jasa Kesehatan; serta Sektor Jasa lainnya. Berdasarkan analisis DLQ menunjukkan bahwa terdapat tiga belas sektor yang diidentifikasi sebagai sektor basis dimasa mendatang. Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa hanya terdapat dua sektor yang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama di tingkat Provinsi yaitu Sektor Listrik dan Gas; dan Sektor Perdagangan.

**Kata Kunci:** *Potensi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Basis, Daya Saing Ekonomi, Location Quotient (LQ), Dynamic Location Quotient (DLQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), Overlay.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap negara selalu ingin mencapai tingkat pertumbuhan yang sebesar-besarnya karena tingkat pertumbuhan merupakan salah satu ukuran kinerja pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Dengan kondisi ekonomi global yang sampai saat ini masih belum pulih sepenuhnya pasti akan berdampak kepada resiko turunnya tingkat pertumbuhan ekonomi pada berbagai negara salah satunya di Indonesia.<sup>1</sup>

Negara Indonesia pada saat ini sedang giatnya mendorong pertumbuhan ekonominya. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah harus gencar dalam melakukan pembangunan secara merata di berbagai sektor dalam mencapai pembangunan yang merata, diperlukan pula campur tangan dari setiap daerah dikarenakan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau. Oleh karena itu, dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah memberikan kemandirian dan keleluasaan bagi setiap daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri atau dengan kata lain sering disebut otonomi daerah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Khumairoh, N. S., Efi, E. D. S., Aida, N., Qomariah, N., & Nasir, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2007-2016. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 6(1), 105-116.

<sup>2</sup> Korengkeng, R. R., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(01).



Kegiatan ekonomi yang bervariasi, mendorong setiap daerah kabupaten atau kota untuk mengembangkan potensi ekonominya masing-masing. Maka dari itu



pembangunan pada suatu daerah dilaksanakan secara terpadu dan serasi serta diarahkan agar pembangunan yang berlangsung di setiap daerah benar-benar sesuai dengan prioritas dan potensi daerah mereka masing-masing. Apabila dalam pelaksanaan prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki pada masing-masing daerah, maka pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi kurang optimal, keadaan tersebut hanya akan berdampak pada lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur yang dapat dipakai untuk meningkatkan pembangunan suatu daerah dari berbagai macam sektor ekonomi yang secara tidak langsung menggambarkan pada tingkat perubahan ekonomi.<sup>3</sup>

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah merupakan pertambahan tingkat pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu: kenaikan pada seluruh nilai tambah (*Value Added*) yang terjadi. Indikator perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari kurun waktu ke waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan berdasarkan harga konstan. Biasanya Badan Pusat Statistik dalam menerbitkan laporan pendapatan regional tersedia angka dalam harga berlaku dan harga konstan.<sup>4</sup>

Pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tidak tumbuh secara bersamaan, tetapi butuh waktu yang berbeda untuk berkembang di setiap daerahnya. Jika pertumbuhan terjadi di satu daerah, maka daerah di sekitarnya akan mulai

---

<sup>3</sup> Badri, J. (2015). Analisis potensi dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Solok. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2).

<sup>4</sup> Rasyid, A. (2016). Analisis Potensi Sektor Pertanian di Kabupaten Kediri Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 99-111.

mengikuti pertumbuhan tersebut. Dalam skala nasional, peningkatan pendapatan dicerminkan pada Produk Nasional Bruto (PNB), sedangkan daerah dicerminkan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).<sup>5</sup>

Kondisi dan potensi ekonomi pada suatu daerah merupakan modal dasar dan faktor dominan penentu strategi kebijakan pembangunan ekonomi daerah. Adanya kondisi dan potensi tiap-tiap daerah yang berbeda mengakibatkan strategi kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah daerah juga berbeda-beda.<sup>6</sup> Begitupun dengan daerah Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan, strategi pembangunan ekonomi perlu diambil dan diterapkan dengan mengarah kepada perkembangan pusat-pusat sumber pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dalam upaya mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah, kebijakan utama yang perlu dilakukan yaitu dengan mengusahakan semaksimal mungkin prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah. Hal ini terkait dengan potensi pertumbuhan ekonomi yang dimiliki setiap daerah sangat bervariasi, maka setiap daerah harus menentukan sektor ekonomi yang dominan.<sup>7</sup> Berikut ini merupakan tabel peranan setiap sektor ekonomi dalam perekonomian Kabupaten Wajo dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017:

---

<sup>5</sup> Budhi, Made Kembar Sri. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol 6 No.1 Febuari 2013.

<sup>6</sup> Saputra, D. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Creative Research Journal*, 2(1), 1-18.

<sup>7</sup> Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.

**Tabel 1.1 PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (Juta Rupiah)**

NO	Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian	2,908,821	3,204,621	3,358,016	3,648,198	3,864,609
2	Pertambangan dan Penggalian	1,992,436	2,310,896	2,525,197	2,410,221	2,408,556
3	Industri Pengolahan	346,207	364,215	389,198	419,515	445,928
4	Pengadaan Listrik dan Gas	9,883	10,533	11,687	12,394	13,059
5	Pengadaan Air	3,708	3,856	3,888	4,019	4,299
6	Konstruksi	834,065	881,597	949,921	1,007,676	1,068,237
7	Perdagangan	1,428,617	1,542,849	1,651,374	1,799,404	1,947,030
8	Transportasi dan Pergudangan	309,831	335,768	358,061	376,062	403,194
9	Penyediaan Akomodasi	31,006	33,637	35,970	38,735	41,863
10	Informasi dan Komunikasi	168,501	175,977	193,511	211,619	234,622
11	Jasa Keuangan	227,298	238,182	256,907	296,491	303,160
12	Real Estate	294,479	324,471	352,148	375,284	398,251
13	Jasa Perusahaan	10,738	11,435	12,060	12,996	14,021
14	Administrasi Pemerintahan	392,434	401,875	432,766	427,360	447,350
15	Jasa Pendidikan	319,483	334,787	362,038	389,626	423,562
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	113,801	125,951	135,599	146,170	158,814
17	Jasa lainnya	37,664	40,430	43,305	47,042	52,481
<b>PDRB</b>		<b>9,428,973</b>	<b>10,341,082</b>	<b>11,071,645</b>	<b>11,622,810</b>	<b>12,229,036</b>

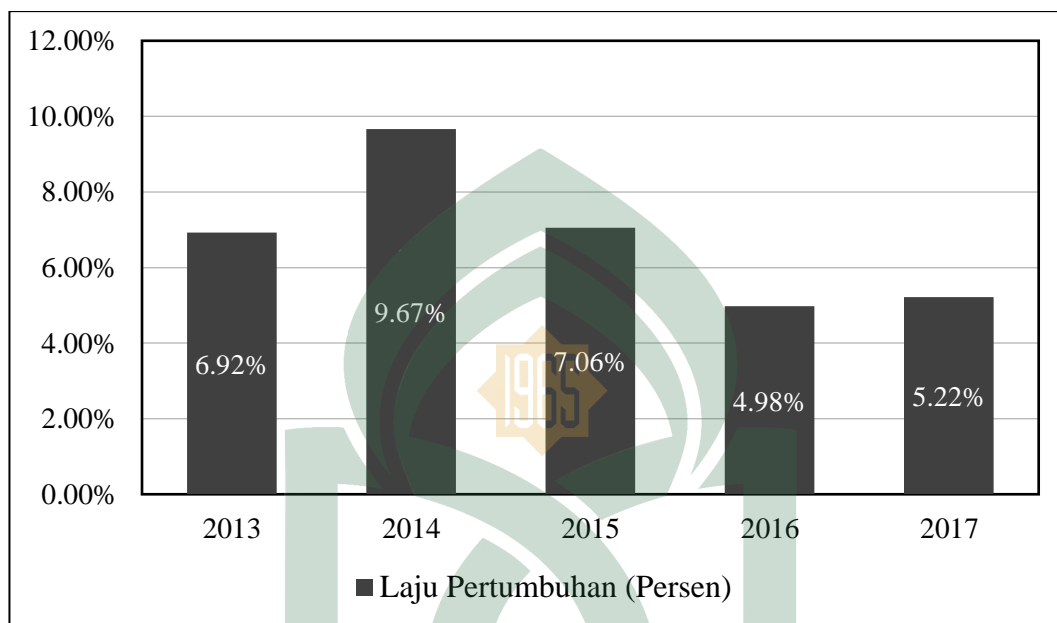
Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2019

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa perekonomian di Kabupaten Wajo memiliki prospek pada sektor pertanian yang memiliki kontribusi terbanyak dibanding sektor-sektor lainnya. Pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Wajo selama tahun 2013-2017 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dapat dilihat pada tahun 2013 sebesar 9,428,973 juta naik di tahun 2014 menjadi 10,341,082 juta. Pada tahun selanjutnya kembali naik menjadi 11,071,645 juta demikian di tahun selanjutnya yaitu 2016 sebesar 11,622,810 juta hingga di tahun 2017 naik mencapai 12,229,036 juta.

Akan tetapi, jika dilihat dari segi laju pertumbuhannya maka akan terlihat bahwa peningkatan PDRB Kabupaten Wajo yang setiap tahunnya meningkat

berbanding terbalik dengan laju pertumbuhannya yang cenderung mengalami fluktuatif seperti yang tergambar pada diagram berikut ini:

**Diagram 1.1 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (Persen)**



Sumber : BPS Kabupaten Wajo, 2019

Berdasarkan diagram di atas, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo selama periode lima tahun dari tahun 2013-2017 relatif mengalami fluktuasi. Dapat dilihat pada tahun 2013 yang tumbuh sebesar 6,92 %, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2014 menjadi 9,67 %. Pada tahun 2015 dan 2016 laju pertumbuhan menurun menjadi 7,06 % di tahun 2015 dan 4,98 % di tahun 2016, kemudian naik lagi pada tahun 2017 menjadi 5,22 %. Melihat kondisi tersebut perlu dicermati lebih mendalam sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan posisi sektor-sektor ekonomi pada Kabupaten Wajo sebagai masukan untuk rumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Wajo.



Sesuai amanah otonomi daerah, setiap daerah diberi kewenangan untuk menggali potensi yang dimilikinya. Setiap daerah mempunyai keunggulan ekonomi yang berbeda, sekaligus yang menjadi sumber pertumbuhan wilayah.<sup>8</sup> Oleh karena itu, dalam konteks ini maka pemerintah daerah Kabupaten Wajo dituntut untuk mampu menggali sumber keunggulan ekonomi guna menjamin perekonomiannya dapat berkembang cepat sesuai dengan ketersediaan potensi dan kemampuannya.

Berdasarkan uraian diatas, penting untuk diteliti lebih mendalam terkait sektor yang menjadi sektor unggulan di daerah Kabupaten Wajo. Selain itu, keunggulan suatu sektor dapat pula dilihat dari indikator daya saingnya. Oleh karena itu, daya saing sektor basis juga sangat penting untuk dikaji guna mengetahui ke depannya sektor basis mana yang memiliki daya saing yang kuat sebagai sumber kekuatan ekonomi daerah di Kabupaten Wajo.

Kajian analisis ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada sektor basis ekonomi daerah itu sendiri, yang kemudian berdampak terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo. Dengan demikian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)”.

---

<sup>8</sup>Syaiful, S., Syaparuddin, S., & Artis, D. (2014). Analisis Sektor Basis dalam Hubungannya dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1), 39-50.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Sektor-Sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Wajo ?
2. Bagaimana potensi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo ?
3. Bagaimana daya saing perekonomian Kabupaten Wajo terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis di dalam perekonomian Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui potensi sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo.
3. Untuk mengetahui daya saing perekonomian Kabupaten Wajo terhadap perekonomian Sulawesi Selatan.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi pemerintah kabupaten Wajo dalam melakukan perencanaan pembangunan terlebih khusus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
2. Sebagai input bagi penelitian yang berkaitan dengan kajian mengenai potensi pertumbuhan ekonomi dan sektor basis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan pendapatan nasional secara berarti (dengan meningkatnya pendapatan perkapita) dalam suatu periode tertentu. Menurut Simon Kuznet, pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.

Definisi tersebut memiliki tiga komponen: 1) Pertumbuhan ekonomi suatu negara terlihat dari peningkatan secara terus menerus persediaan barang; 2) teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka jenis barang kepada penduduk; 3) penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian dalam bidang kelembagaan dan ideologis sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia agar dapat dimanfaatkan secara tepat.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Jhingan, ML. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.57

Ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern menurut Kuznets adalah sebagai berikut :<sup>10</sup>

1. Laju pertumbuhan penduduk dan produk perkapita, dimana bahwa jika jumlah suatu penduduk meningkat maka harus juga dibarengi dengan bertambahnya jumlah pendapatan perkapita
2. Peningkatan Produktifitas, dimana pertumbuhan ekonomi yang meningkat nampak pada produk perkapita khususnya terjadi perbaikan kualitas input yang meningkatkan efisiensi dan produktifitas perunit input.
3. Laju perubahan struktural, dimana perubahan ini mencakup perubahan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, dari perusahaan perorangan menjadi perusahaan berbadan hukum serta perubahan pada status kerja buruh.
4. Urbanisasi, dimana pertumbuhan ini ditandai dengan semakin banyaknya penduduk di negara maju yang berpindah dari daerah pedesaan ke perkotaan.
5. Ekspansi Negara Maju, dimana pertumbuhan ini ditandai dengan ilmu dan pengetahuan modern yang mulai berkembang, dan revolusi industri yang tadinya terjadi di Inggris sekarang telah bergeser dan menyebar ke wilayah Eropa dan Jepang.

---

<sup>10</sup> Ibrahim, I. (2018). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016). *Gorontalo Development Review*, 1(1), 44-58.

Dalam Subandi (2011) menyatakan bahwa teori pertumbuhan Rostow terbagi dalam lima tahapan dan kemungkinan setiap negara berada pada salah satu dari tahap-tahap pembangunan sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Tahap masyarakat tradisional (*the traditional Society*)
2. Tahap prasyarat lepas landas (*the precondition for take off*)
3. Tahap lepas landas (*the take off*)
4. Tahap gerak menuju kematangan (*the drive of maturity*)
5. Tahap Konsumsi masa tinggi (*the age of high mass consumption*)

Sedangkan teori pertumbuhan ekonomi menurut Sjafrizal (2014) membedakan teori pertumbuhan yang terdapat dalam teori makro, teori pertumbuhan ekonomi ini menekankan perhatiannya terhadap pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah tertentu saja dan tidak pada suatu negara sebagaimana lazimnya pada analisis ekonomi makro. Disamping itu, Teori pertumbuhan ekonomi wilayah mengandung unsur lokasi dan tata ruang secara eksplisit ke dalam analisisnya.<sup>12</sup>

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang merupakan keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang

---

<sup>11</sup> Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan* Cetakan ke satu, Penerbit Alfabeta, Bandung, h.47

<sup>12</sup> Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.88



dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu, biasanya satu tahun.<sup>13</sup>

Pengertian PDRB menurut Badan Pusat Statistik dapat dibedakan yaitu: 1) Menurut pengertian produksi, yaitu suatu jumlah atau nilai produk barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh beberapa jenis produksi yang beroperasi dalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu; 2) Menurut pengertian pendapatan, yaitu jumlah balas jasa yang diterima dari faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu; 3) Menurut pengertian pengeluaran, yaitu jumlah pengeluaran yang dilakukan untuk konsumsi dalam rumah tangga maupun lembaga swasta yang tidak mencari laba, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan pada stok dan ekspor disuatu daerah dalam jangka waktu tertentu.<sup>14</sup>

Untuk menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), terdapat tiga pendekatan yang dapat digunakan, yaitu:<sup>15</sup>

1. Pendekatan produksi, maksudnya PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barangan dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 17 sektor, yaitu : 1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, 2. Pertambangan dan Penggalan, 3.

---

<sup>13</sup> Rahayu, S. A. T. (2017). Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987-2000).

<sup>14</sup> BPS. (2010). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan 2010. Sulawesi Selatan. BPS Sulawesi Selatan, h.30

<sup>15</sup> Chumaidatul, Miroah. (2015). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang Melalui Pendekatan Tipologi Klassen*. Universitas Negeri Semarang, h.32

Industri Pengolahan, 4. Listrik dan Gas, 5. Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, 6. Konstruksi, 7. Perdagangan, 8. Transportasi dan Pergudangan, 9. Akomodasi, 10. Informasi, 11. Jasa Keuangan, 12. Real Estate, 13. Jasa Perumahan, 14. Adm. Pemerintah, 15. Jasa Pendidikan, 16. Jasa Kesehatan, 17. jasa Lainnya.

2. Pendekatan Pendapatan, maksudnya PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan), semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
3. Pendekatan Pengeluaran, maksudnya PDRB adalah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari : 1) pengeluaran konsumsi rumah tangga, 2) konsumsi pemerintah, 3) pembentukan modal tetap domestik bruto, 4) perubahan stok, dan 5) ekspor netto (ekspor dikurangi impor).

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan terkait penetapan tahun dasar beberapa kali. Salah satunya ialah tahun dasar 2000 menjadi 2010, dimana perubahan dasar tersebut mengklasifikasi sembilan sektor ekonomi menjadi tujuh belas sektor ekonomi. Hal ini dikarenakan perekonomian tahun

2010 relatif stabil dan adanya rekomendasi dari PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap lima atau sepuluh tahun.<sup>16</sup>

Banyaknya ahli ekonomi maupun fikih yang memberikan perhatiannya terhadap pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan arti pertumbuhan ekonomi bukan hanya sebatas aktivitas produksi saja. Lebih dari itu, pertumbuhan ekonomi merupakan aktivitas menyeluruh dalam suatu bidang produksi yang berkaitan erat pada keadilan distribusi. Pertumbuhan bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan aktivitas setiap manusia yang ditujukan untuk pertumbuhan dan kemajuan sisi material dan spiritual manusia.

Beberapa pemahaman pokok terkait pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari perspektif Islam diantaranya mengenai batasan tentang persoalan ekonomi itu sendiri, pandangan Islam tidaklah sama dengan yang dianut oleh kapitalis, dimana yang dimaksud dengan persoalan ekonomi yaitu persoalan kekayaan dan minimnya sumber-sumber kekayaan. Pandangan Islam menyatakan bahwa hal itu sesuai dengan kapitalis yang telah disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang ditujukan untuk mengatasi persoalan kehidupan manusia.<sup>17</sup>

Menurut Abdurrahman Yusro<sup>18</sup>, pertumbuhan ekonomi itu sendiri telah tergambar dalam QS. Nuh/71:10-12.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> BPS. (2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. Sulawesi Selatan. BPS Sulawesi Selatan, h.3-4

<sup>17</sup> Nurul Huda, dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta, h. 124.

<sup>18</sup> Ibid, h.139.

<sup>19</sup> Departemen Agama, RI. (2010) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponogoro, hlm. 570.

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا . يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا . وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَيَبْنِيَنَّ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ  
وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا

Terjemahnya :

*“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan (pula di dalamnya) untukmu sungai-sungai.”*

Dijelaskan pula dalam firman Allah SWT QS. Al-Ar'raaf/7:96.<sup>20</sup>

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ

Terjemahnya :

*“Jika Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.*

Dari uraian ayat tersebut dapat dipahami, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup akan kita dapatkan selama kita rajin untuk melakukan istighfar (minta ampun). Allah SWT telah menjanjikan rizki yang sangat berlimpah kepada suatu kaum, jika suatu kaum tersebut bebas dari kemaksiatan serta senantiasa berjalan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Akan tetapi, apabila kemaksiatan merajalela dalam masyarakat dan tidak taat kepada tuhan, maka tidak akan mendapatkan ketenangan dan stabilitas kehidupan.

---

<sup>20</sup> Ibid, h.151.

## 2. Teori Sektor Basis

Teori basis ekonomi mendasari pandangannya bahwa laju pertumbuhan suatu daerah ditentukan oleh seberapa besar tingkat ekspor dari daerah tersebut. Perekonomian regional dapat dibedakan menjadi dua sektor, yaitu kegiatan basis dan non basis. Kegiatan basis merupakan mengekspor barang dan jasa ke wilayah di luar batas-batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan. Sedangkan kegiatan non basis merupakan kegiatan yang tidak mengekspor, yakni hanya kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan di dalam daerah itu sendiri.

Meningkatnya kegiatan basis di dalam suatu wilayah akan menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya dan menciptakan kenaikan volume kegiatan non basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan menimbulkan minimnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam daerah bersangkutan dan turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan non basis. Dengan demikian kegiatan basis ekonomi mempunyai peranan sebagai penggerak pertama (*primer mover rule*), sedangkan pada setiap perubahan memiliki “*efek multiplier*” terhadap perekonomian regional, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.<sup>21</sup>

Pelopor pertama teori basis ekspor murni adalah Tiebout yang kemudian dikembangkan dalam pengertian ekonomi regional, di mana ekspor didefinisikan sebagai kegiatan menjual produk dan jasa keluar wilayah baik ke wilayah lain dalam negara itu maupun keluar negeri. Tenaga kerja yang berdomisili di wilayah kita, tetapi bekerja dan memperoleh uang dan wilayah lain termasuk dalam

---

<sup>21</sup> Husna, N. (2013). *Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 188-196.



pengertian ekspor. Pada dasarnya kegiatan ekspor adalah seluruh kegiatan baik itu penghasil produk maupun penyedia jasa yang mendatangkan uang dari luar wilayah di sebut kegiatan basis.<sup>22</sup>

Sektor basis pada dasarnya harus dikaitkan dengan suatu bentuk perbandingan, baik itu perbandingan yang berskala regional, nasional, maupun internasional. Dalam lingkup internasional, suatu kegiatan ekonomi/sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan dalam lingkup nasional, suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor basis apabila sektor di daerah tersebut mampu bersaing dengan sektor yang dihasilkan oleh wilayah lain di pasar nasional atau pasar domestic. Apabila salah satu sektor tersebut menjadi sektor basis maka sektor tersebut kemudian harus mengekspor produknya ke wilayah lain, sebaliknya jika sektor tersebut merupakan sektor non basis maka harus mengimpor produk sektor tersebut ke daerah lain.<sup>23</sup>

Blakely dan Bradshaw menjelaskan teori basis ekonomi pada asumsinya bahwa secara umum ekonomi suatu wilayah dapat dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor non basis. Sektor basis membangun dan memacu penguatan pertumbuhan ekonomi lokal. Sektor basis diidentifikasi sebagai “mesin” ekonomi lokal dan disebut sebagai basis ekonomi dari suatu wilayah.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Mangilaleng, E. J., Rotinsulu, D., & Rompas, W. (2015). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).

<sup>23</sup> Subanti, S., & Hakim, A. R. (2009). *Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara: Pendekatan Sektor Basis dan Analisis Input- Output*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 10(1), 13-33.

<sup>24</sup> Bafadal, Azhar. (2014). *Analisis Sektor Basis Pertanian Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah*. Jurnal AGRIPPLUS. Vol. 24 No. 2 : 152-160, 2014, h.152

Pengertian ekonomi basis di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah: (1) perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, (2) perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah, (3) perkembangan teknologi, dan (4) adanya pengembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah: (1) adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan (2) kehabisan cadangan sumberdaya.<sup>25</sup>

### 3. Daya Saing Ekonomi

Menurut World Economic Forum (WEF) daya saing dimaknai sebagai kemampuan ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi serta berkelanjutan. Definisi lain juga diungkapkan oleh Institute of Management and Development (IMD) yang menyatakan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan dengan cara mengelola asset, daya tarik investasi, globalitas serta dengan mengintegrasikan keterkaitan-keterkaitan tersebut dalam suatu model ekonomi dan sosial.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Sudirman, S., & Alhudhori, M. (2018). Analisis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 3(1), 94-107.

<sup>26</sup> Sukanto, S. (2009). *Analisis Daya Saing Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan*. *Journal of Economics & Development Policy*, 7(2), 86-102.

Daya saing suatu wilayah menunjukkan kemampuan wilayah tersebut menciptakan nilai tambah guna mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik maupun persaingan internasional. Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan, tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam konsep daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan pada masyarakatnya pun semakin tinggi pula. Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat mempengaruhi posisi tawar masing-masing daerah dalam hal persaingan global yang semakin ketat. Keadaan demikian selanjutnya diartikan sebagai tantangan bahkan tuntutan bagi setiap daerah di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saing masing-masing daerah, dimana tingginya daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan “ujung tombak” terhadap peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing secara global<sup>27</sup>

Menurut Porter (2000) daya saing daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota daerah, wilayah atau Negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara

---

<sup>27</sup> Huda, M., & Santoso, E. B. (2014). Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C81-C86.

berkelanjutan.<sup>28</sup> Faktor keunggulan komparatif (comparative advantage) dan faktor keunggulan kompetitif (competitive advantage) merupakan dua faktor utama yang menjadi faktor penentu dalam upaya meningkatkan daya saing. Kemudian Porter (2008) menjelaskan mengenai Lima Kekuatan Strategi Pembentuk Persaingan Industri dimana kelima faktor yang menentukan kekuatan persaingan dalam suatu industry tersebut adalah:

1. ancaman dari produk pengganti,
2. ancaman dari pesaing lainnya,
3. ancaman yang berasal dari pendatang baru,
4. daya tawar pemasuk, serta
5. daya tawar yang dimiliki oleh konsumen.

Keunggulan kompetitif merupakan usaha suatu perusahaan untuk membedakannya dari perusahaan pesaing yang lainnya. Barney dalam Potter (2008) menjelaskan terkait indikator empiris yang memiliki potensi sumber daya perusahaan dalam menghasilkan keuntungan kompetitif yang berkelanjutan yaitu nilai, kelangkaan, sulit ditiru oleh perusahaan pesaing dan keberadaan barang pengganti. Faktor-faktor yang harus dimiliki untuk mencapai keunggulan komparatif adalah teknologi, produktivitas tinggi, tingkat entrepreneurship yang tinggi, kualitas barang yang di produksi, promosi meluas yang gencar, tenaga kerja terampil yang profesional, kreativitas dan motivasi tinggi.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Santoso, E. B. (2009). Daya Saing Kota-Kota Besar di Indonesia. In *Makalah. Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS*. Surabaya.

<sup>29</sup> Adiyadnya, M. S. P., & Setiawina, N. D. (2015). *Analisis Tingkat Efektivitas Dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan Desa Peguyangan Kangin*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 4, 265-281.

Martin dan Tyler berpendapat dalam Soebagyo (2013) dalam gagasannya yang terkait keunggulan komparatif telah digunakan lebih daripada keunggulan kompetitif atau daya saing. Konsep keunggulan komparatif menyatakan bahwa suatu negara atau daerah melalui spesialisasi, bisa mendapatkan keuntungan dari perdagangan bahkan jika mereka tidak memiliki keunggulan absolut. Menurut teori keunggulan komparatif, perdagangan mencerminkan perbedaan nasional dalam faktor anugerah/ endowments (tanah, tenaga kerja, sumber daya alam dan modal). Suatu negara atau wilayah akan mendapatkan keuntungan komparatif yang berbasis faktor anugerah (endowment) di industri yang memanfaatkan secara intensif faktor-faktor yang mereka miliki secara melimpah. Menurut Martin dalam Soebagyo (2013) menyatakan konsep dan definisi daya saing suatu negara atau daerah mencakup beberapa elemen utama sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak;
2. Mampu berkompetisi dengan daerah/negara lain;
3. Mampu memenuhi kewajibannya baik domestik maupun internasional;
4. Dapat menyediakan lapangan kerja; dan
5. Pembangunan yang berkesinambungan serta tidak membebani generasi yang akan datang.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Nailatul Husna, Irwan Noor dan Mochammad Rozikin (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik. Pendekatan yang

---

<sup>30</sup> Soebagiyo, D., & Hascaryo, A. S. (2015). Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Tengah.

digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan metode Location Quotient dan Shift Share. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa sektor yang paling potensial dikembangkan di Kabupaten Gresik yaitu, sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan dukungan Pemerintah Kabupaten Gresik dilihat dari RPJPD dan RPJMD serta alokasi APBD cenderung memprioritaskan pada sektor yang kurang potensial seperti perdagangan, hotel, dan restoran; serta pertanian. Maka, pemerintah Kabupaten Gresik perlu memprioritas program pembangunan maupun pengalokasian anggarannya pada sektor unggulan.<sup>31</sup>

Rany Lolowang, Antonius Luntungan, dan Richard Tumilaar (2014) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan Daya Saing Ekonomi). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient (LQ) dan Analisis Shift Share. Hasil penelitian menunjukkan Perekonomian Kabupaten Minahasa selama kurun waktu pengamatan dalam penelitian mengalami peningkatan dan perkembangan setiap tahun. Sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis atau unggulan dalam perekonomian Kabupaten Minahasa adalah sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, dan sektor bangunan dan konstruksi. Dan daya saing perekonomian Kabupaten

---

<sup>31</sup> Husna, N. (2013). Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 188-196.

Minahasa terhadap Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara masih dikatakan lemah, hal ini terlihat dari nilai DS (Differential Shift) yang negatif.<sup>32</sup>

Taufik Chandra (2015) dengan judul penelitiannya “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kota Makassar”. Data yang digunakan adalah data time series yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota makassar berupa data PDRB Kota Makassar tahun 2008 - 2012 atas dasar Harga Konstan yang di analisis dengan menggunakan analisis LQ untuk menentukan sektor yang berpotensi dan sektor yang kurang berpotensi. Hasil penelitian ini menunjukkan dari 9 sektor yang diteliti diperoleh koefisien nilai LQ yang  $> 1$  adalah sektor Perdagangan dengan nilai rata-rata LQ 1,13, sektor Industri Pengolahan dengan nilai rata-rata LQ 1,02, kemudian sektor jasa-jasa dengan nilai rata-rata LQ 1,19, Artinya ketiga sektor tersebut berpotensi untuk dikembangkan karena sektor tersebut merupakan sektor unggulan bagi pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.<sup>33</sup>

Putu Gede Bayu Nugraha Putra dan I Nengah Kartika (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Sektor-Sektor Potensial Dalam Menentukan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2011. Penelitian ini menggunakan data sekunder dalam bentuk time series yaitu data tahunan sebanyak sebelas tahun dari tahun 2001-2011, dengan menggunakan tiga analisis yaitu Location Quotien (LQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP), dan analisis overlay. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa sektor dominan di Kabupaten

---

<sup>32</sup> Lolowang, R., Luntungan, A., & Tumilaar, R. (2014). *Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan Daya Saing Ekonomi)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3).

<sup>33</sup> Chandra, T. (2015). “Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kota Makassar”.



Badung adalah sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Saran yang dapat disampaikan adalah sektor-sektor ekonomi yang bukan unggulan agar lebih dikembangkan lagi sehingga dapat berguna bagi kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan PDRB serta Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung.<sup>34</sup>

Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, dan Yuciana Wilandari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)”. Metode yang digunakan adalah metode Tipologi Klassen, LQ, MRP, Overlay dan Shift Share. Metode-metode ini mengklasifikasikan sektor-sektor ekonomi menjadi empat yaitu sektor unggulan, sektor berkembang, sektor potensial dan sektor tertinggal, berdasarkan besarnya kontribusi dan laju pertumbuhannya. Dengan mengambil wilayah studi Kabupaten Kendal dan wilayah referensi Propinsi Jawa Tengah, maka dengan metode-metode tersebut dapat diketahui sektor mana yang menjadi sektor unggulan Kabupaten Kendal. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari analisa beberapa metode tersebut, didapat hasil yang sama tentang sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Kendal yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalian.<sup>35</sup>

### C. Kerangka Pikir

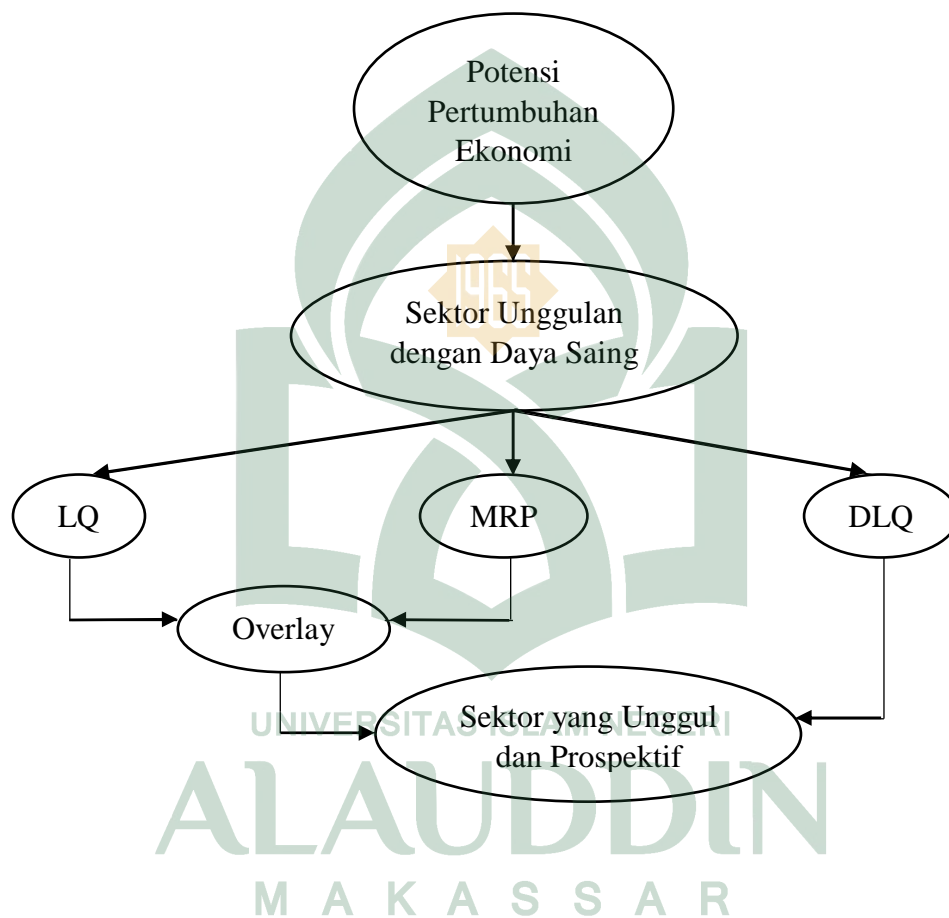
---

<sup>34</sup> Putra, P. G. B. N., & Kartika, I. N. (2013). Analisis Sektor-Sektor Potensial Dalam Menentukan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2011. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(9).

<sup>35</sup> Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., & Wilandari, Y. (2013). Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010). *Jurnal Gaussian*, 2(3), 219-228.

Kerangka berfikir menggambarkan arah penelitian dan bertujuan untuk memudahkan penelitian. Berdasarkan teori yang ada dan penelitian terdahulu maka dapat disimpulkan mengenai kerangka pikir teoritis penelitian ini, adalah sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian**



### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Sedangkan Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu daerah Kabupaten Wajo. Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara sengaja yaitu mempertimbangkan alasan yang diketahui dari sifat daerah atau lokasi tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.

##### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif deskriptif lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran kuantitatif yang akurat. Data yang akan dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

##### **C. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder berupa data PDRB atas dasar harga konstan dengan rangkaian masa selama lima tahun terakhir tahun 2013-2017. Data tersebut merupakan data time series yaitu data yang disusun berdasarkan waktu pada suatu variable tertentu.

Sedangkan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari kantor atau instansi yang terkait dengan tujuan peneliti yaitu, Badan Pusat Statistik



(BPS) Provinsi Sulawesi Selatan dan BPS Kabupaten Wajo serta sumber lain berupa studi kepustakaan.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dengan cara melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan (tulisan atau papan, tempat kertas dan orang).<sup>36</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

##### **1. Analisis Location Quotient (LQ)**

Untuk mengetahui sektor basis dan non basis di Kabupaten Wajo, metode yang digunakan adalah analisis Location Quotient (LQ). Metode LQ adalah salah satu pendekatan yang umum digunakan pada model ekonomi basis sebagai langkah awal dalam memahami sektor kegiatan dari PDRB Kabupaten Wajo yang menjadi pemacu pertumbuhan perekonomiannya. Metode LQ ini digunakan untuk mengkaji kondisi suatu perekonomian yang mengarah pada identifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian. Sehingga Nilai pada LQ yang sering digunakan untuk penentuan sektor basis dapat dikatakan sebagai sektor yang akan mendorong tumbuh kembangnya sektor lain yang diikuti oleh terciptanya lapangan kerja. LQ adalah indikator sederhana yang memperlihatkan kekuatan atau besar kecilnya peranan sektor dalam suatu daerah dibandingkan dengan

---

<sup>36</sup> Suharsimi. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. h. 223

daerah lainnya. Ada dua cara dalam mengukur LQ. Pertama, yaitu melalui pendapatan nilai tambah atau PDRB. Kedua, yaitu dengan melalui pendekatan tenaga kerja. Berkaitan dengan tujuan penelitian, dalam mengukur LQ menggunakan pendekatan nilai tambah atau PDRB adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{y_i / y_j}{Y_i / Y_j}$$

Keterangan:

LQ = Nilai Location Quotient

$y_i$  = PDRB sektor ekonomi di Kabupaten Wajo

$y_j$  = PDRB total sektor ekonomi Kabupaten Wajo

$Y_i$  = PDRB sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

$Y_j$  = PDRB total sektor ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan

Kriteria untuk menganalisa nilai LQ adalah:

- a.  $LQ > 1$ , berarti sektor/sub sektor di daerah tersebut merupakan sektor basis.
- b.  $LQ < 1$ , berarti sektor/sub sektor di daerah tersebut merupakan sektor non basis.

## 2. Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) merupakan alat analisis untuk melihat deskripsi suatu kegiatan atau sektor ekonomi yang berpotensi berdasarkan pada kriteria pertumbuhan struktur ekonomi wilayah baik dari segi eksternal maupun internal.<sup>37</sup> Analisis MRP terbagi atas dua kriteria, yaitu Rasio

---

<sup>37</sup> Nisa, H. (2014). *Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro, h.55

Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr). Berikut penjelasan dari kedua kriteria dalam analisis MRP.

1. Rasio pertumbuhan wilayah studi (RPs) yaitu perbandingan antara pertumbuhan pendapatan. Dalam hal ini pertumbuhan PDRB sektor *i* di wilayah yang diteliti dengan pertumbuhan pendapatan PDRB sektor *i* di wilayah referensi (kabupaten/kota/kawasan terhadap Provinsi).

$$RPs = \frac{\Delta E_{ij} / E_{ij}}{\Delta E_j / E_j}$$

Keterangan :

$\Delta E_{ij}$  : Perubahan PDRB sektor *i* di Kabupaten Wajo

$E_{ij}$  : PDRB sektor *i* di Kabupaten Wajo pada awal tahun penelitian

$\Delta E_j$  : Perubahan PDRB Kabupaten Wajo

$E_j$  : PDRB Kabupaten Wajo pada awal tahun penelitian

Jika RPs lebih besar dari 1 maka RPs dikatakan (+), berarti pertumbuhan suatu sektor produksi tertentu di tingkat kabupaten/kota lebih pesat dari pertumbuhan pada sektor produksi tertentu provinsi, dan jika nilai RPs lebih kecil dari 1 dikatakan (-), dengan kata lain pertumbuhan suatu sektor produksi tertentu di tingkat kabupaten/kota/kawasan lebih rendah dibanding pertumbuhan sektor provinsi.

2. Rasio pertumbuhan wilayah referensi (RPr) yaitu perbandingan antara laju pertumbuhan pendapatan kegiatan  $i$  di wilayah referensi dengan laju pertumbuhan total kegiatan (PDRB) wilayah referensi (Provinsi).

$$RPr = \frac{\Delta E_{in} / E_{in}}{\Delta E_n / E_n}$$

Keterangan:

$\Delta E_{in}$  : Perubahan PDRB sektor  $i$  di Provinsi Sulawesi Selatan

$E_{in}$  : PDRB sektor  $i$  di Provinsi Sulawesi Selatan pada awal tahun penelitian

$\Delta E_n$  : Perubahan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

$E_n$  : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan pada awal tahun penelitian

Jika nilai RPr lebih besar dari 1 diberi notasi positif (+) yang artinya pertumbuhan pada suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi (provinsi/nasional) lebih tinggi dibanding pertumbuhan PDRB total wilayahnya, sedangkan jika nilai RPr lebih kecil dari 1 diberi notasi negatif (-) yang artinya pertumbuhan pada suatu sektor tertentu dalam wilayah referensi (provinsi/nasional) lebih rendah dibanding pertumbuhan PDRB total wilayahnya.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Putra, A. N. (2013). *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, h.37



Dari hasil analisis MRP (RPs dan RPr) dapat diperoleh deskripsi sektor ekonomi yang potensial dikembangkan di daerah kabupaten/kota di provinsi yang kemudian diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yakni;

- a. Klasifikasi I, jika kedua nilai RPr dan RPs bernotasi positif (+), berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi.
- b. Klasifikasi II, jika nilai RPr bernotasi (+) dan RPs bernotasi (-), berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat provinsi sementara di tingkat kabupaten belum menonjol.
- c. Klasifikasi III, jika nilai RPr bernotasi (-) dan RPs bernotasi (+), berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang belum menonjol di tingkat provinsi, namun di tingkat kabupaten termasuk menonjol.
- d. Klasifikasi IV, jika kedua nilai RPr dan RPs bernotasi (-), berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi.

### 3. Analisis Overlay

Analisis overlay digunakan untuk menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan alat analisis dengan tujuan menyaring hasil analisis yang paling baik. Teknik analisis ini memberikan penilaian kepada setiap sektor-sektor ekonomi dengan melihat nilai positif (+) dan nilai negatif (-). Sektor yang jumlah nilai positif (+) paling banyak berarti sektor tersebut merupakan sektor unggulan dan begitu juga dengan sebaliknya jika suatu sektor tidak memiliki nilai positif berarti sektor tersebut bukan merupakan sektor unggulan.

Notasi Positif berarti koefisien komponen lebih dari satu dan negatif kurang dari satu. Jika nilai RPr bernotasi positif berarti pertumbuhan sektro  $i$  lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan total di wiliayah referensi. Jika RPs bernotasi positif berarti pertumbuhan sektor  $i$  lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah referensi. Sementara untuk metode LQ yang diberi nilai positif diberikan pada sektor ekonomi yang nilai koefisien LQ lebih besar dari 1 ( $LQ > 1$ ).<sup>39</sup>

Kriteria dalam analisis overlay sebagai berikut:

- a. RPr, RPs, dan LQ ketiganya bernilai positif (+), berarti sektor tersebut memiliki potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama di tingkat provinsi.
- b. RPr bernilai negatif (-), sedangkan RPs dan LQ bernilai positif (+), berarti sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi di kabupaten/kota.
- c. RPr, RPs, dan LQ ketiganya bernilai negatif (-), berarti sektor tersebut kurang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada tingkat provinsi.

#### 4. Dynamic Location Quotient (DLQ)

Analisis Dynamic Location Quotient (DLQ) digunakan untuk mengetahui sebesar apakah perubahan yang terjadi pada suatu sektor perekonomian di suatu daerah dan bagaimana perkembangan pada sektor perekonomian tersebut dengan

---

<sup>39</sup> Sabar, W. (2015). Sektor Potensial Pengembangan Ekonomi Wilayah (Potential Sectors Of Regional Economic Development). *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 2(1), 48-61.

cara membandingkan dengan sektor yang sama di tingkat wilayah yang lebih luas sebarannya. Untuk mendapatkan nilai DLQ pada suatu sektor perekonomian dapat diketahui dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:<sup>40</sup>

$$DLQ = \left( \frac{(1 + g_j)/(1 + G_j)}{(1 + g_i)/(1 + G_i)} \right)^t$$

Keterangan:

- DLQ : Indeks potensi sektor *i* di daerah kab/kota
- g<sub>j</sub>* : Laju pertumbuhan sektor *i* di daerah kab/kota
- G<sub>j</sub>* : Rata-rata laju pertumbuhan sektor *i* di daerah kab/kota
- g<sub>i</sub>* : Laju pertumbuhan sektor *i* di provinsi
- G<sub>i</sub>* : Rata-rata laju pertumbuhan sektor *i* di provinsi
- t* : Selisih tahun akhir dan tahun awal

Kriteria dalam nilai DLQ yang diperoleh sebagai berikut:

- a.  $DLQ \geq 1$ , maka potensi perkembangan sektor *i* di kabupaten/kota lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi dan masih dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.
- b.  $DLQ < 1$ , maka potensi perkembangan sektor *i* di kabupaten/kota lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi dan sektor tersebut kemudian tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.

---

<sup>40</sup> Santoso, F. (2016). Identifikasi Potensi Sektor Ekonomi Basis Dan Non Basis kota Kediri Tahun 2009–2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(2).

## **F. Definisi Operasional**

1. Sektor basis adalah sektor-sektor penunjang pada suatu daerah tertentu atau kegiatan menjual barang dan jasa ke luar wilayah, baik ke wilayah lain dalam negara maupun ke negara lain.
2. Sektor non-basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan, sektor-sektor yang tidak mengekspor barang dan jasa, ruang lingkup utama mereka adalah daerah pasar yang bersifat lokal.
3. Daya saing ekonomi adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

## **BAB IV**

### **HASL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Daerah Penelitian**

##### **1. Kondisi Geografis**

Secara geografis wilayah Kabupaten Wajo terletak pada tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari Kota Makassar yang merupakan Ibukota Provinsi Sulawesi Selatan, memanjang pada arah laut Tenggara dan terakhir merupakan selat, dengan posisi geografis antara  $3^{\circ} 39'$  -  $4^{\circ} 16'$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ} 53'$  -  $120^{\circ} 27'$  Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Wajo sebesar 2.506,19 Km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian Penggunaan lahan terdiri dari lahan tegal/kebun 38.769,4 Ha, ladang/huma 11.780 Ha, perkebunan 29.914,1 Ha, tanah tanaman kayu-kayu hutan 7.226,5 Ha, dan lainnya 62.575 Ha.

Pada tahun 2007 Kabupaten Wajo telah terbagi menjadi 14 Kecamatan. Batas wilayah Kabupaten Wajo sebagai berikut: 1) Sebelah Utara, berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Kabupaten Sidrap; 2) Sebelah Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Soppeng; 3) Sebelah Timur, berbatasan dengan Teluk Bone; 4) Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Sidrap.

Secara morfologi, wilayah Kabupaten Wajo memiliki ketinggian lahan di atas permukaan laut (dpl) dengan perincian sebagai berikut: 1) 0-7 meter, luas 57,263 Ha atau sekitar 22,85 %; 2) 8-25 meter, luas 94,539 Ha atau sekitar

37,72%; 3) 26-100 meter, luas 87,419 Ha atau sekitar 34,90 %; 4) 101-500 meter, luas



11,231 Ha atau sekitar 4,50 %; 5) di atas 500 meter luasnya hanya 167 Ha atau sekitar 0,66 %. Adapun luas wilayah dari setiap kecamatan di Kabupaten Wajo sebagai berikut:

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2018**

No	Kecamatan	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Sabbangparu	132,75	5,30
2.	Tempe	38,27	1,53
3.	Pammana	162,10	6,47
4.	Bola	220,13	8,78
5.	Takkalalla	179,76	7,17
6.	Sajoanging	167,01	6,66
7.	Penrang	154,90	6,18
8.	Majauleng	225,92	9,01
9.	Tanasitolo	154,60	6,17
10.	Belawa	172,30	6,88
11.	Maniangpajo	175,96	7,02
12.	Gilireng	147,00	5,87
13.	Keera	368,36	14,70
14.	Pitumpanua	207,13	8,26

*Sumber: BPS Kabupaten Wajo Tahun 2019*

## 2. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah komponen yang sangat penting dalam mendukung serta menunjang pembangunan suatu daerah. Terutama jika jumlah penduduk yang tergolong besar itu mempunyai tingkat produktivitas yang rendah dari penduduk yang tergolong rendah, maka jumlah penduduk yang banyak akan menjadi beban bagi daerah tersebut. Dengan demikian kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan.

Berikut Tabel 4.2 menunjukkan jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo 2017.

**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Wajo, 2017**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki	Perempuan	Jumlah Total	
1	Sabbangparu	12.141	14.106	26.247	86,07
2	Tempe	31.473	33.862	65.335	92,94
3	Pammana	14.857	16.907	31.764	87,87
4	Bola	9.416	10.316	19.723	91,28
5	Takkalalla	10.004	10.977	20.981	91,14
6	Sajoanging	9.278	9.735	19.013	95,31
7	Penrang	7.400	8.408	15.808	88,01
8	Majauleng	14.833	16.933	31.766	87,60
9	Tanasitolo	18.957	21.009	39.966	90,23
10	Belawa	15.504	16.992	32.496	91,24
11	Maniangpajo	7.948	8.351	16.299	95,17
12	Gilireng	5.519	5.851	11.370	94,33
13	Keera	11.126	11.260	22.386	98,81
14	Pitumpanua	20.923	21.497	42.420	97,33
<b>Wajo</b>		<b>189.379</b>	<b>206.204</b>	<b>395.583</b>	<b>91,84</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Wajo Tahun 2019*

Berdasarkan Tabel 4.2, menunjukkan bahwa total keseluruhan penduduk Kabupaten Wajo pada tahun 2017 berdasarkan proyeksi penduduk sebanyak 395.583 jiwa yang terdiri atas 189.379 jiwa penduduk laki-laki dan 206.204 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 91,84.

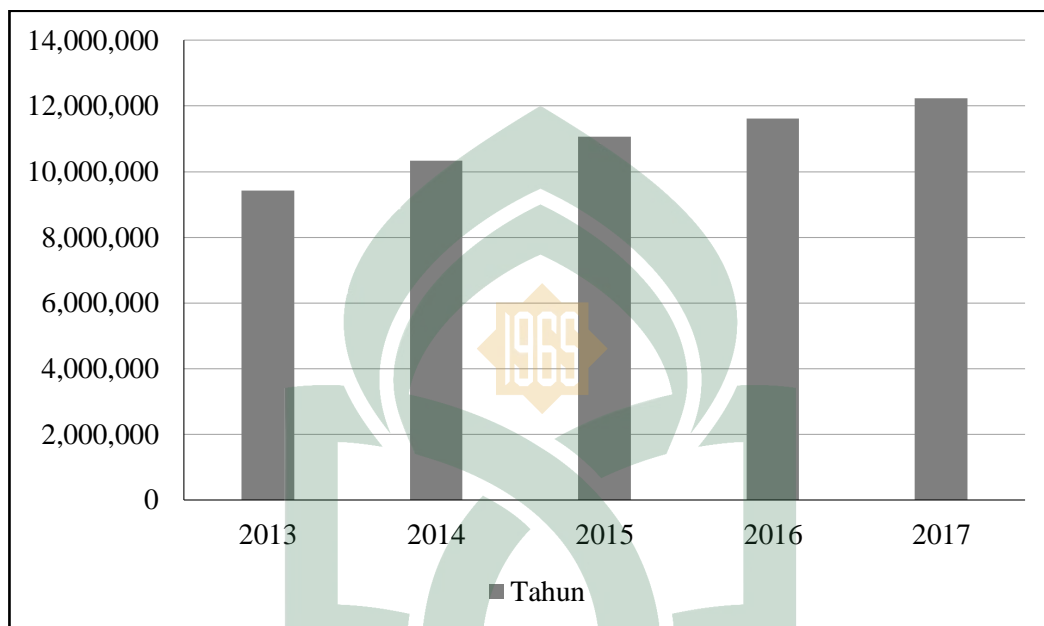
### 3. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur secara makro ialah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah yang kemudian diperlukan guna untuk mempercepat struktur perekonomian yang berimbang dan dinamis bercirikan industri yang kuat serta



memiliki basis pertumbuhan sektoral yang seimbang, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baiknya kegiatan ekonomi yang di peroleh dari laju pertumbuhan PDRB.<sup>41</sup>

**Diagram 4.1 PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (Juta Rupiah)**



Sumber: BPS Kabupaten Wajo, 2019

Berdasarkan pada Diagram 4.1, dapat dilihat bahwa PDRB Kabupaten Wajo atas dasar harga konstan 2010 selama tahun 2013-2017 mengalami peningkatan secara umum. Dari diagram tersebut, diketahui bahwa secara umum setiap sektoral mengalami peningkatan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Wajo dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 total PDRB Kabupaten Wajo sebesar 9,428,973 juta mengalami peningkatan pada tahun 2014 sebesar 10,341,082 juta, selanjutnya tahun 2015 juga mengalami peningkatan sebesar

<sup>41</sup> Suprijati, J., & Yakin, A. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bangkalan Setelah Adanya Pembangunan Jembatan Suramadu (Analisis Teori Harrod-Domar). *Develop*, 1(1). h.2

11,071,645 juta rupiah demikian pula di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 sebesar 11,622,810 juta rupiah dan pada tahun 2017 merupakan pencapaian tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni sebesar 12,229,036 juta rupiah.

**Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013 - 2017 (Persen)**

No	Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,82	10,17	4,79	8,64	5,93	7,27
2	Pertambangan & Penggalan	2,32	15,98	9,27	-4,55	-0,07	4,59
3	Industri Pengolahan	8,14	5,20	6,86	7,79	6,30	6,86
4	Listrik dan Gas	12,83	6,58	10,96	6,04	5,36	8,35
5	Pengadaan Air	0,55	4,01	0,82	3,37	6,96	3,14
6	Konstruksi	11,96	5,70	7,75	6,08	6,01	7,50
7	Perdagangan	5,35	8,00	7,03	8,96	8,20	7,51
8	Transportasi dan Pergudangan	9,56	8,37	6,64	5,03	7,21	7,36
9	Akomodasi	11,21	8,48	6,93	7,69	8,08	8,48
10	Informasi dan Komunikasi	14,64	4,44	9,96	9,36	10,87	9,85
11	Jasa Keuangan	10,71	4,79	7,86	15,41	2,25	8,20
12	Real Estate	16,33	10,18	8,53	6,57	6,12	9,55
13	Jasa Perusahaan	17,01	6,50	5,46	7,76	7,89	8,92
14	Adm. Pemerintahan	6,55	2,41	7,69	-1,25	4,68	4,02
15	Jasa Pendidikan	12,03	4,79	8,14	7,62	8,71	8,26
16	Jasa Kesehatan	12,18	10,68	7,66	7,80	8,65	9,39
17	Jasa lainnya	8,34	7,34	7,11	8,63	11,56	8,60
<b>PDRB</b>		<b>6,92</b>	<b>9,67</b>	<b>7,06</b>	<b>4,98</b>	<b>5,22</b>	<b>6,77</b>

Sumber: BPS Kabupaten Wajo (Data Diolah), 2018

Selanjutnya pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami fluktuasi, hal ini disebabkan karena adanya beberapa sektor ekonomi pada tahun tertentu yang mengalami perlambatan bahkan mencapai minus seperti yang terjadi pada sektor pertambangan dan penggalan pada tahun 2015 sebesar 9,27% yang kemudian

mengalami penurunan drastis di tahun 2016 yang mengakibatkan laju pertumbuhannya mencapai minus menjadi -4,55%. Disisi lain, hal serupa juga terjadi pada sektor jasa keuangan pada tahun 2017 sebesar 2,25% yang mengalami penurunan sekitar 85,40% dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan sebesar 15,41%. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo yang ditunjukkan dalam laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo atas dasar harga konstan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Percepatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo tahun 2017 didorong oleh pertumbuhan positif pada seluruh lapangan usaha ekonomi kecuali sektor Pertambangan dan Penggalan. Sektor Pertambangan dan Penggalan menjadi satu-satunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi dengan pertumbuhan negatif 0,07 persen pada tahun 2017, sebagai dampak dari produksi gas alam pada tahun 2017 yang turun sebesar 6,3 persen dibanding pada tahun 2016. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh karena peranan sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB Kabupaten Wajo cukup berarti.

Namun demikian, lapangan usaha lainnya dapat dikatakan mampu menahan gejolak pertumbuhan yang negatif pada Sektor Pertambangan dan Penggalan. Pada Tahun 2017 pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh Sektor Jasa Lainnya yaitu sebesar 11,56 persen, diikuti oleh Sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 10,87 persen. Selanjutnya Sektor Jasa Kesehatan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mampu tumbuh pada kisaran 8 persen tahun 2017.<sup>42</sup>



---

<sup>42</sup> BPS. (2018). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Wajo. BPS Kabupaten Wajo.

## B. Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis *Location Quotient (LQ)*

Untuk menjawab rumusan masalah terkait sektor basis dan non basis dalam perekonomian Kabupaten Wajo, maka teknik analisis yang digunakan adalah *Location Quotient (LQ)*. Teknik analisis LQ dilakukan dengan cara membandingkan nilai pada sektor lapangan usaha PDRB Kabupaten Wajo tahun tertentu dengan nilai sektor lapangan usaha PDRB Provinsi Sulawesi Selatan yang sama dalam lima tahun pengamatan, sehingga dapat diketahui sektor-sektor apa saja yang tergolong sektor basis maupun non basis. Pengamatan ini dilakukan selama tahun dari 2013 sampai dengan tahun 2017.

Dalam analisis *Location Quotient (LQ)* terdapat tiga kriteria yaitu, jika nilai  $LQ > 1$  mengindikasikan bahwa kabupaten/kota mempunyai spesialisasi yang tinggi (basis), yang kedua jika nilai  $LQ < 1$  mengindikasikan bahwa kabupaten/kota mempunyai spesialisasi yang rendah (non basis), dan yang ketiga jika nilai  $LQ = 1$  mengindikasikan bahwa kabupaten/kota mengalami self sufficient (tingkat spesialisasi yang sama ditingkat provinsi). Untuk melihat hasil perhitungan indeks LQ Kabupaten Wajo pada tahun 2013-2017 kita dapat melihat pada Tabel 4.4.

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient (LQ)* terhadap tujuh belas sektor perekonomian di Kabupaten Wajo berdasarkan atas dasar harga konstan tahun 2013-2017, dapat dilihat bahwa empat dari tujuh belas sektor di Kabupaten Wajo dikategorikan sebagai sektor basis, hal itu ditunjukkan dari hasil LQ masing-masing sektor dimana keempat sektor tersebut memiliki nilai  $LQ > 1$ .



**Tabel 4.4 Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ) Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	Tahun					Rata-rata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,45	1,42	1,41	1,45	1,49	1,44 (b)
2	Pertambangan & Penggalian	3,47	3,55	3,62	3,49	3,40	3,51 (b)
3	Industri Pengolahan	0,26	0,25	0,25	0,25	0,26	0,25 (nb)
4	Listrik dan Gas	1,14	1,02	1,15	1,12	1,13	1,11 (b)
5	Pengadaan Air	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29 (nb)
6	Konstruksi	0,74	0,72	0,72	0,73	0,73	0,73 (nb)
7	Perdagangan	1,09	1,08	1,07	1,09	1,08	1,08 (b)
8	Transportasi dan Pergudangan	0,85	0,89	0,89	0,88	0,89	0,88 (nb)
9	Akomodasi	0,24	0,24	0,24	0,25	0,24	0,24 (nb)
10	Informasi dan Komunikasi	0,28	0,27	0,28	0,29	0,30	0,28 (nb)
11	Jasa Keuangan	0,69	0,67	0,67	0,70	0,70	0,68 (nb)
12	Real Estate	0,86	0,86	0,87	0,89	0,92	0,88 (nb)
13	Jasa Perusahaan	0,26	0,26	0,26	0,26	0,27	0,26 (nb)
14	Adm. Pemerintahan	0,88	0,86	0,86	0,87	0,89	0,87 (nb)
15	Jasa Pendidikan	0,62	0,61	0,61	0,63	0,64	0,62 (nb)
16	Jasa Kesehatan	0,65	0,64	0,63	0,64	0,66	0,65 (nb)
17	Jasa lainnya	0,32	0,31	0,31	0,31	0,32	0,31 (nb)

Sumber: Data sekunder setelah diolah, Tahun 2019

Adapun sektor perekonomian di Kabupaten Wajo yang dikategorikan sebagai sektor basis, yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,44; Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai rata-rata LQ sebesar 3,51; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,11; dan Sektor Perdagangan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 1,08. Keempat sektor tersebut memiliki nilai  $LQ > 1$  yang mengindikasikan bahwa tingkat spesialisasi pada sektor perekonomian tersebut dapat memenuhi kebutuhan dalam daerahnya dan dapat mengekspor keluar wilayah.

Meskipun sektor basis merupakan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wajo dan sangat potensial untuk dikembangkan, akan tetapi kita tidak boleh melupakan sektor non basis, karena dengan adanya sektor basis tersebut maka sektor yang tergolong non basis dapat dibantu untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga berpotensi menjadi sektor basis baru di masa mendatang.

Adapun sektor perekonomian yang tergolong sebagai sektor non basis sebanyak tiga belas sektor yaitu: Sektor Industri Pengolahan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,25; Sektor Pengadaan Air dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,29; Sektor Konstruksi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,73; Sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,88; Sektor Akomodasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,24; Sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,28; Sektor Jasa Keuangan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,68; Sektor Real Estate dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,88; Sektor Jasa Perusahaan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,26; Sektor Adm. Pemerintahan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,87; Sektor Jasa Pendidikan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,62; Sektor Jasa Kesehatan dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,65; dan Sektor Jasa lainnya dengan nilai rata-rata LQ sebesar 0,31. Ketiga belas sektor tersebut memiliki nilai rata-rata LQ  $< 1$  yang mengindikasikan bahwa tingkat spesialisasi sektor perekonomian tersebut rendah yang artinya sektor ini dalam memproduksi hanya mampu memenuhi kebutuhan dalam daerah dan belum mampu mengeksport produksinya.

Ketiga belas sektor ekonomi diatas yang memiliki nilai LQ  $< 1$  memberikan isyarat kepada pemerintah Kabupaten Wajo untuk dapat



mengevaluasi kebijakan dan kegiatan pembangunan yang telah terlaksana serta menentukan arah kebijakan yang tepat untuk mendorong ketiga belas sektor tersebut untuk kelak dapat menjadi sektor basis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rany Lolowang, Antonius Luntungan, dan Richard Tumilaar (2014) tentang “Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa” menghasilkan bahwa Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Wajo memiliki kesamaan di antara beberapa sektor yang tergolong sektor basis dan potensial untuk dikembangkan, yakni kedua kabupaten ini sama-sama memiliki potensi ekonomi pada sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalan; dan sektor pengadaan listrik dan gas.

Adapun teori yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, yaitu teori yang dikemukakan oleh Blakely dan Bradshaw dimana ia menyatakan bahwa sektor basis mampu membangun dan memacu penguatan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah.

## **2. Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)**

Untuk menjawab rumusan masalah terkait potensi sektor-sektor ekonomi di masa yang akan datang, maka analisis yang digunakan adalah analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ). Pada dasarnya prinsip DLQ sebenarnya sama dengan LQ, akan tetapi dalam analisis DLQ melihat sektor-sektor ekonomi yang dapat menjadi sektor basis untuk jangka panjang. Asumsinya, bahwa nilai tambah

sektoral maupun PDRB memiliki rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun  $(0)$  dan tahun  $(t)$ .<sup>43</sup>

**Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Dynamic Location Quotient (DLQ) Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	Rr (g)	Hasil (g)	Rr (G)	Hasil (G)	Per Kab/Prov	DLQ
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.27	1.06	6.80	0.93	1.15	<b>2.01</b> (b)
2	Pertambangan & Penggalian	4.59	0.72	5.99	0.83	0.86	<b>0.47</b> (nb)
3	Industri Pengolahan	6.86	1.01	7.65	1.03	0.98	<b>0.90</b> (nb)
4	Listrik dan Gas	8.35	1.20	8.25	1.10	1.09	<b>1.54</b> (b)
5	Pengadaan Air	3.14	0.53	4.26	0.63	0.85	<b>0.44</b> (nb)
6	Konstruksi	7.50	1.09	8.17	1.09	1.00	<b>1.01</b> (b)
7	Perdagangan	7.51	1.09	8.53	1.13	0.97	<b>0.86</b> (nb)
8	Transportasi & Pergudangan	7.36	1.08	6.11	0.85	1.27	<b>3.30</b> (b)
9	Akomodasi	8.48	1.22	8.10	1.08	1.13	<b>1.84</b> (b)
10	Informasi dan Komunikasi	9.85	1.40	9.28	1.22	1.14	<b>1.93</b> (b)
11	Jasa Keuangan	8.20	1.18	8.01	1.07	1.10	<b>1.61</b> (b)
12	Real Estate	9.55	1.36	7.04	0.96	1.42	<b>5.77</b> (b)
13	Jasa Perusahaan	8.92	1.28	7.18	0.97	1.31	<b>3.86</b> (b)
14	Adm. Pemerintahan	4.02	0.65	3.65	0.55	1.17	<b>2.19</b> (b)
15	Jasa Pendidikan	8.26	1.19	7.24	0.98	1.21	<b>2.59</b> (b)
16	Jasa Kesehatan	9.39	1.34	9.01	1.19	1.12	<b>1.76</b> (b)
17	Jasa lainnya	8.60	1.24	8.62	1.15	1.08	<b>1.47</b> (b)

Sumber: Data sekunder setelah diolah, Tahun 2019

Dalam Analisis DLQ, apabila suatu sektor dalam perekonomian memiliki nilai  $\geq 1$ , maka potensi perkembangan pada sektor  $i$  di kabupaten/kota lebih cepat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi dan masih dapat

<sup>43</sup> Syaiful, S., Syaparuddin, S., & Artis, D. (2014). Analisis Sektor Basis dalam Hubungannya dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1), 39-50.

diharapkan menjadi sektor basis pada masa yang akan datang. Akan tetapi jika suatu sektor memiliki nilai  $DLQ < 1$ , maka potensi perkembangan pada sektor  $i$  di kabupaten/kota lebih lambat dibandingkan dengan sektor yang sama di tingkat provinsi dan sektor tersebut kemudian tidak dapat diharapkan menjadi sektor basis pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pada Tabel 4.5 menunjukkan bahwa dari tujuh belas sektor ekonomi pada Kabupaten Wajo terdapat tiga belas sektor yang tergolong sektor basis dimasa mendatang. Dengan mengacu pada hasil perhitungan DLQ pada tabel diatas, maka dapat di identifikasikan sebagai berikut:

- a. Terdapat tiga belas sektor di Kabupaten Wajo yang memiliki nilai rata-rata  $DLQ > 1$ , yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai rata-rata sebesar 2,01; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas dengan nilai rata-rata sebesar 1,54; Sektor Konstruksi dengan nilai rata-rata sebesar 1,01; Sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai rata-rata sebesar 3,30; Sektor Penyediaan Akomodasi dengan nilai rata-rata sebesar 1,84; Sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai rata-rata sebesar 1,93; Sektor Jasa Keuangan dengan nilai rata-rata sebesar 1,61; Sektor jasa Real Estate dengan nilai rata-rata sebesar 5,77; Sektor Jasa Perusahaan dengan nilai rata-rata sebesar 3,86; Sektor Administrasi Pemerintahan dengan nilai rata-rata sebesar 2,19; Sektor Jasa Pendidikan dengan nilai rata-rata sebesar 2,56; Sektor Jasa Kesehatan dengan nilai rata-rata sebesar 1,76; serta Sektor Lainnya dengan nilai rata-rata sebesar 1,47. Ketiga belas sektor ini diidentifikasi dapat menjadi sektor basis dimasa mendatang, karena sektor tersebut memiliki potensi perkembangan

lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

- b. Terdapat empat sektor yang memiliki nilai rata-rata  $DLQ < 1$ , yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai rata-rata sebesar 0,47; Sektor Industri Pengolahan dengan nilai rata-rata sebesar 0,90; Sektor Pengadaan Air dengan nilai rata-rata sebesar 0,44; serta Sektor Perdagangan dengan nilai rata-rata sebesar 0,86. Keempat sektor ini diprediksi tidak dapat diharapkan untuk menjadi sektor basis dimasa yang akan datang di Kabupaten Wajo, hal ini dikarenakan proporsi laju pertumbuhan sektor tersebut terhadap laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Wajo lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama pada PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Hanya dua sektor yang dinyatakan sebagai sektor basis baik saat ini (LQ) maupun dimasa yang akan datang (DLQ), yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Sedangkan Sektor Pertambangan dan Penggalian; dan Sektor Perdagangan berdasarkan analisis DLQ untuk masa yang akan datang diprediksi akan menjadi sektor non basis walaupun dinyatakan sebagai sektor basis pada saat ini (LQ).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Syaiful, Syaparuddin dan Dearmi Artis (2014) tentang “Analisis Sektor Basis dalam Hubungannya dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Batang Hari” menghasilkan bahwa Kabupaten Wajo dan Kabupaten Batang Hari memiliki kesamaan pada sektor-sektor ekonomi yang diprediksi dapat menjadi

sektor basis dimasa yang akan datang, yaitu sektor pertambangan dan penggalian; sektor pengadaan listrik; sektor transportasi; dan sektor jasa lainnya.

### 3. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

Model Rasio Pertumbuhan merupakan alat analisis yang digunakan untuk menentukan sektor yang potensial dari segi pertumbuhan sektor ekonomi masing-masing yang ada di Kabupaten Wajo. Teknik analisis MRP dilakukan dengan cara membandingkan rasio pertumbuhan antara wilayah studi (kabupaten/kota) dengan wilayah referensi (provinsi).

Dalam analisis MRP terdapat empat klasifikasi yaitu: 1) Klasifikasi I, jika kedua nilai RPr dan RPs bernotasi positif (+), berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi; 2) Klasifikasi II, jika nilai RPr bernotasi (+) dan RPs bernotasi (-), berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat provinsi sementara di tingkat kabupaten belum menonjol; 3) Klasifikasi III, jika nilai RPr bernotasi (-) dan RPs bernotasi (+), berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang belum menonjol di tingkat provinsi, namun di tingkat kabupaten termasuk menonjol; 4) Klasifikasi IV, jika kedua nilai RPr dan RPs bernotasi (-), berarti sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Berikut Tabel 4.6 menunjukkan hasil dari analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) pada Kabupaten Wajo pada tahun 2013-2017.

**Tabel 4.6 Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	RPr		RPs	
		Nilai	Notasi	Nilai	Notasi
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,92	-	1,11	+
2	Pertambangan & Penggalan	0,81	-	0,44	-
3	Industri Pengolahan	1,03	+	1,08	+
4	Listrik dan Gas	1,05	+	1,24	+
5	Pengadaan Air	0,58	-	0,53	-
6	Konstruksi	1,09	+	1,14	+
7	Perdagangan	1,15	+	1,18	+
8	Transportasi dan Pergudangan	0,83	-	1,11	+
9	Akomodasi	1,09	+	1,29	+
10	Informasi dan Komunikasi	1,22	+	1,52	+
11	Jasa Keuangan	1,06	+	1,28	+
12	Real Estate	0,95	-	1,37	+
13	Jasa Perusahaan	0,97	-	1,34	+
14	Adm. Pemerintahan	0,51	-	0,59	-
15	Jasa Pendidikan	0,98	-	1,29	+
16	Jasa Kesehatan	1,20	+	1,40	+
17	Jasa lainnya	1,15	+	1,35	+

*Sumber: Data sekunder setelah diolah, Tahun 2019*

Berdasarkan hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) terhadap tujuh belas sektor perekonomian di Kabupaten Wajo (2013-2017) diperoleh sektor-sektor yang menonjol baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat referensi. Berdasarkan hasil olah data pada Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa terdapat sembilan sektor yang dikategorikan dalam klasifikasi I yakni Sektor Industri Pengolahan dengan nilai RPr 1,03 dan RPs 1,08; Sektor Listrik dan Gas dengan nilai RPr 1,05 dan RPs 1,24; Sektor Konstruksi dengan nilai RPr 1,09 dan RPs 1,14; Sektor Perdagangan dengan nilai RPr 1,15 dan RPs 1,18; Sektor Akomodasi dengan nilai RPr 1,09 dan RPs 1,29; Sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai RPr 1,22 dan RPs 1,52; Sektor Jasa Keuangan dengan

nilai RPr 1,06 dan RPs 1,28; Sektor Jasa Kesehatan dengan nilai RPr 1,20 dan RPs 1,40; serta Sektor Jasa lainnya dengan nilai RPr 1,15 dan RPs 1,35. Kesembilan sektor tersebut memiliki notasi (+) baik dari segi RPr maupun RPs yang berarti bahwa kesembilan sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di Kabupaten Wajo maupun di Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan pada tabel diatas, tidak ada satupun lapangan usaha yang tergolong dalam klasifikasi II dalam hal ini nilai RPr bernotasi (+) dan RPs bernotasi (-) yang berarti bahwa tidak ada satupun sektor yang memiliki pertumbuhan yang menonjol di tingkat provinsi sementara di tingkat kabupaten belum menonjol. Namun tidak demikian dalam klasifikasi III, terdapat lima sektor yang memiliki nilai RPr bernotasi (-) dan nilai RPs bernotasi (+) yang berarti kelima sektor tersebut memiliki pertumbuhan yang belum menonjol di Provinsi Sulawesi Selatan, namun di Kabupaten Wajo termasuk menonjol. Kelima Sektor tersebut yakni Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai RPr 0,92 dan RPs 1,11; Sektor Transportasi dan Pergudangan dengan nilai RPr 0,83 dan RPs 1,11; Sektor Real State dengan nilai RPr 0,95 dan RPs 1,37; Sektor Jasa Perusahaan dengan nilai RPr 0,97 dan RPs 1,34; serta Sektor Pendidikan dengan nilai RPr 0,98 dan RPs 1,29.

Sedangkan untuk sektor yang keduanya memiliki nilai RPr dan RPs bernotasi negatif ialah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai RPr 0,81 dan RPs 0,44; Sektor Pengadaan Air dengan nilai RPr 0,58 dan RPs 0,53; serta Sektor Administrasi Pemerintahan dengan nilai RPr 0,51 dan RPs 0,59. Ketiga sektor ini dikategorikan dalam Klasifikasi IV yang berarti bahwa ketiga sektor

tersebut memiliki pertumbuhan yang rendah baik di Kabupaten Wajo maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, dan Yuciana Wilandari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)” menghasilkan bahwa Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wajo memiliki kesamaan pada Sektor Pertanian, dimana sektor tersebut yang memiliki pertumbuhan yang belum menonjol di tingkat provinsi namun ditingkat kabupaten termasuk menonjol.

#### **4. Analisis Overlay**

Untuk menjawab rumusan masalah terkait daya saing perekonomian Kabupaten Wajo terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan, maka teknik analisis yang digunakan adalah analisis overlay, analisis ini merupakan rangkuman antara hasil dari alat analisis *LQ* dengan MRP yaitu Rasio pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr) dan Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs). Analisis ini digunakan guna menentukan sektor unggulan dengan menggabungkan kedua alat analisis dengan tujuan untuk menyaring hasil analisis yang paling baik.

Dalam analisis overlay terdapat tiga kriteria yaitu 1) Jika RPr, RPs, dan *LQ* ketiganya bernilai positif, mengindikasikan bahwa sektor tersebut memiliki potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama di tingkat provinsi; 2) Jika RPr bernilai negatif (-), sedangkan RPs dan *LQ* bernilai positif (+), mengindikasikan bahwa



sektor tersebut merupakan spesialisasi kegiatan ekonomi di kabupaten/kota, dan;

3) Jika RPr, RPs, dan LQ ketiganya bernilai negatif (-), mengindikasikan bahwa sektor tersebut kurang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama pada tingkat provinsi.

**Tabel 4.7 Hasil Analisis Overlay Kabupaten Wajo  
Tahun 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Nilai	Notasi	Nilai	Notasi	Nilai	Notasi	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,92	-	1,11	+	1,44	+	- + +
2	Pertambangan & Penggalan	0,81	-	0,44	-	3,51	+	- - +
3	Industri Pengolahan	1,03	+	1,08	+	0,25	-	+ + -
4	Listrik dan Gas	1,05	+	1,24	+	1,11	+	+ + +
5	Pengadaan Air	0,58	-	0,53	-	0,29	-	- - -
6	Konstruksi	1,09	+	1,14	+	0,73	-	+ + -
7	Perdagangan	1,15	+	1,18	+	1,08	+	+ + +
8	Transportasi dan Pergudangan	0,83	-	1,11	+	0,88	-	- + -
9	Akomodasi	1,09	+	1,29	+	0,24	-	+ + -
10	Informasi dan Komunikasi	1,22	+	1,52	+	0,28	-	+ + -
11	Jasa Keuangan	1,06	+	1,28	+	0,68	-	+ + -
12	Real Estate	0,95	-	1,37	+	0,88	-	- + -
13	Jasa Perusahaan	0,97	-	1,34	+	0,26	-	- + -
14	Adm. Pemerintahan	0,51	-	0,59	-	0,87	-	- - -
15	Jasa Pendidikan	0,98	-	1,29	+	0,62	-	- + -
16	Jasa Kesehatan	1,20	+	1,40	+	0,65	-	+ + -
17	Jasa lainnya	1,15	+	1,35	+	0,31	-	+ + -

*Sumber: Data sekunder setelah diolah, Tahun 2019*

Dari hasil analisis overlay maka akan diperoleh sektor-sektor yang unggul baik dari sisi kontribusinya maupun dari sisi pertumbuhannya. Metode ini memberikan penilaian kepada sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo dengan

melihat nilai positif (+) dan negatif (-), koefisien komponen yang memiliki nilai lebih dari satu dikategorikan sebagai nilai yang bernotasi positif, sedangkan untuk notasi negatif diartikan sebagai koefisien komponen yang memiliki nilai kurang dari satu.

Berdasarkan pada hasil olah data diatas, dapat dilihat bahwa hasil analisis overlay menunjukkan bahwa hanya terdapat dua sektor yang memenuhi kriteria I (nilai RPr, RPs, *LQ* bernotasi positif) yakni Sektor Listrik dan Gas; dan Sektor Perdagangan, yang mengindikasikan bahwa kedua sektor ini memiliki potensi daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk sektor yang memenuhi kriteria II yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang berarti bahwa sektor ini merupakan satu-satunya sektor yang dijadikan spesialisasi kegiatan ekonomi di Kabupaten Wajo. Sementara untuk sektor yang ketiganya (RPr, RPs, dan *LQ*) memiliki notasi negatif, terdapat pada Sektor Pengadaan Air dan Sektor Administrasi Pemerintahan. Kedua sektor ini dikategorikan dalam kriteria III yang berarti bahwa kedua sektor tersebut tidak memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosita Wahyuningtyas, Agus Rusgiyono, dan Yuciana Wilandari (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)” menghasilkan

bahwa Sektor Pertanian di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Wajo sama-sama merupakan sektor yang dijadikan spesialisasi kegiatan ekonomi di daerahnya.

Adapun teori yang berkaitan dengan hasil penelitian ini yaitu teori Porter tentang daya saing ekonomi, menurut Porter (2000) daya saing daerah menjadi salah satu isu utama dalam pembangunan daerah. Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan kemampuan suatu perusahaan, kota daerah, wilayah atau Negara dalam mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Teori ini berangkat dari keyakinan bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparatif tidak mencukupi atau tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing jika suatu perusahaan, kota daerah, wilayah memiliki keunggulan kompetitif.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari sisi konstribusinya (LQ) terdapat empat sektor yang dikategorikan sebagai sektor basis di Kabupaten Wajo selama periode 2013-2017 yaitu Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; dan Sektor Perdagangan. Sedangkan dalam penentuan sektor potensial dari sisi pertumbuhannya (MRP) menunjukkan bahwa terdapat lima sektor yang memiliki pertumbuhan yang belum menonjol di Provinsi Sulawesi Selatan, namun di Kabupaten Wajo termasuk menonjol, kelima sektor tersebut yakni Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Real State; Sektor Jasa Perusahaan; serta Sektor Pendidikan. Sementara sektor yang memiliki pertumbuhan yang menonjol baik di tingkat Kabupaten Wajo maupun di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Sektor Industri Pengolahan; Sektor Listrik dan Gas; Sektor Konstruksi; Sektor Perdagangan; Sektor Akomodasi; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan; Sektor Jasa Kesehatan; serta Sektor Jasa lainnya.
2. Potensi pada setiap sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Wajo pada masa yang akan datang berdasarkan analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) menunjukkan bahwa terdapat tiga belas sektor yang diidentifikasi dapat

menjadi sektor basis dimasa mendatang, karena ketiga belas sektor tersebut



memiliki potensi perkembangan lebih cepat jika dibandingkan dengan sektor yang sama di Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga belas sektor yang dimaksud adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Konstruksi dengan nilai rata-rata sebesar 1,01; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Penyediaan Akomodasi; Sektor Informasi dan Komunikasi; Sektor Jasa Keuangan; Sektor jasa Real Estate; Sektor Jasa Perusahaan; Sektor Administrasi Pemerintahan; Sektor Jasa Pendidikan; Sektor Jasa Kesehatan; serta Sektor Lainnya.

3. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hanya terdapat dua sektor yang memiliki daya saing kompetitif maupun komparatif yang lebih unggul dibandingkan dengan kegiatan yang sama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2013-2017, yaitu Sektor Listrik dan Gas; dan Sektor Perdagangan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah Kabupaten Wajo diharapkan mampu memprioritaskan sektor-sektor ekonomi pada daerahnya dengan mengacu pada sektor-sektor yang berpotensi untuk dikelola dan dikembangkan dengan cara mempertahankan dan mengembangkan keberadaanya agar dapat menghasilkan sektor yang mampu menjadi prioritas serta nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat.
2. Potensi pengembangan pada pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Wajo harus diupayakan melalui strategi pembangunan yang tepat sasaran

dengan memperhatikan potensi dari masing-masing sektor. Potensi pada setiap sektor merupakan modal dasar demi terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam pengembangan sektor potensial yaitu dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki, serta membangun atau meningkatkan infrastruktur fisik yang dapat menunjang pengembangan pada masing-masing sektor.

3. Sektor-sektor ekonomi yang telah diklasifikasikan sebagai sektor non basis atau sektor yang memiliki daya saing yang rendah memberikan isyarat kepada pemerintah daerah Kabupaten Wajo agar kembali mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah terlaksana serta menetapkan arah kebijakan yang tepat guna mendorong sektor-sektor tersebut agar dapat menjadi sektor basis dan memiliki daya saing yang kompetitif maupun komparatif di masa yang akan datang. Harapan untuk pemerintah daerah Kabupaten Wajo agar lebih serius memperhatikan sektor tersebut melalui akselerasi berbagai program dan kegiatan yang tepat serta penganggaran pembangunan yang memadai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyadnya, M. S. P., & Setiawina, N. D. (2015). *Analisis Tingkat Efektivitas Dan Daya Saing Program Revitalisasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan Desa Peguyangan Kangin*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 4.
- Badri, J. (2015). Analisis potensi dan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Solok. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(2).
- Bafadal, Azhar. (2014). *Analisis Sektor Basis Pertanian Untuk Pengembangan Ekonomi Daerah*. Jurnal AGRIPPLUS. Vol. 24 No. 2 : 152-160, 2014.
- BPS. (2010). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan 2010. Sulawesi Selatan. BPS Sulawesi Selatan.
- \_\_\_\_\_. (2016). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha 2011-2015. Sulawesi Selatan. BPS Sulawesi Selatan.
- \_\_\_\_\_. (2018). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Wajo Menurut Lapangan Usaha 2013-2017. Wajo. BPS Kabupaten Wajo.
- Budhi, Made Kembar Sri. (2013). Analisis Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Bali: Analisis FEM Data Panel. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol 6 No.1 Febuari 2013.
- Chandra, T. (2015). *“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial Di Kota Makassar”*.
- Chumaidatul, Miroah. (2015). *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Kota Semarang Melalui Pendekatan Tipologi Klassen*. Universitas Negeri Semarang.
- Departemen Agama, RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung, Diponogoro.
- Huda, M., & Santoso, E. B. (2014). Pengembangan Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur berdasarkan Potensi Daerahnya. *Jurnal Teknik ITS*, 3(2), C81-C86.
- Husna, N. (2013). *Analisis Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah Di Kabupaten Gresik*. Jurnal Administrasi Publik, 1(1).
- Ibrahim, I. (2018). Analisis Potensi Sektor Ekonomi Dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2012-2016). *Gorontalo Development Review*, 1(1).
- Jhingan, ML. (2014). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Khumairoh, N. S., Efi, E. D. S., Aida, N., Qomariah, N., & Nasir, A. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2007-2016. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 6(1).
- Korengkeng, R. R., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Analisis Potensi, Efektifitas, Efisiensi, Dan Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(01).
- Lolowang, R., Luntungan, A., & Tumilaar, R. (2014). *Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Minahasa (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan Daya Saing Ekonomi)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 14(3).
- Mangilaleng, E. J., Rotinsulu, D., & Rompas, W. (2015). Analisis Sektor Unggulan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(4).
- Nisa, H. (2014). *Analisis Potensi dan Pengembangan Wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Nurul Huda, dkk. (2015). *Ekonomi Pembangunan Islam*, Cetakan ke-1, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Putra, A. N. (2013). *Analisis Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Putra, P. G. B. N., & Kartika, I. N. (2013). Analisis Sektor-Sektor Potensial Dalam Menentukan Prioritas Pembangunan di Kabupaten Badung Tahun 2001-2011. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 2(9).
- Rahayu, S. A. T. (2017). Peranan Sektor Publik Lokal dalam Pertumbuhan Ekonomi Regional di Wilayah Surakarta (1987-2000).
- Rasyid, A. (2016). Analisis Potensi Sektor Potensi Pertanian di Kabupaten Kediri Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1).
- Sabar, W. (2015). Sektor Potensial Pengembangan Ekonomi Wilayah (Potential Sectors Of Regional Economic Development). *EcceS (Economics, Social, and Development Studies)*, 2(1).
- Santoso, E. B. (2009). Daya Saing Kota-Kota Besar di Indonesia. In *Makalah. Seminar Nasional Perencanaan Wilayah dan Kota ITS*. Surabaya.
- Santoso, F. (2016). Identifikasi Potensi Sektor Ekonomi Basis Dan Non Basis kota Kediri Tahun 2009–2013. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 3(2).
- Saputra, D. (2017). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Ketimpangan Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Creative Research Journal*, 2(1).
- Sjafrizal. (2014). *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Soebagiyo, D., & Hascaryo, A. S. (2015). *Analisis Sektor Unggulan Bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jawa Tengah*.
- Subandi. (2011). *Ekonomi Pembangunan Cetakan ke satu*, Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Subanti, S., & Hakim, A. R. (2009). *Ekonomi Regional Provinsi Sulawesi Tenggara: Pendekatan Sektor Basis dan Analisis Input- Output*. Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, 10(1).
- Sudirman, S., & Alhudhori, M. (2018). Analisis Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Perekonomian dan Pembangunan Wilayah Provinsi Jambi. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 3(1).
- Suharsimi. (2009). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukanto, S. (2009). *Analisis Daya Saing Ekonomi Antar Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan*. Journal of Economics & Development Policy, 7(2).
- Suprijati, J., & Yakin, A. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Bangkalan Setelah Adanya Pembangunan Jembatan Suramadu (Analisis Teori Harrod-Domar). *Develop*, 1(1).
- Syaiful, S., Syaparuddin, S., & Artis, D. (2014). Analisis Sektor Basis dalam Hubungannya dengan Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Batang Hari. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 2(1).
- Wahyuningtyas, R., Rusgiyono, A., & Wilandari, Y. (2013). *Analisis Sektor Unggulan Menggunakan Data PDRB (Studi Kasus BPS Kabupaten Kendal Tahun 2006-2010)*. Jurnal Gaussian, 2(3).

## LAMPIRAN

**Lampiran 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,446,728.26	51,101,681.2	54,099,095.69	58,350,615.5	61,468,508.33
2	Pertambangan & Penggalan	13,241,082.09	14,712,008.45	15,802,951.88	15,996,259.27	16,718,885.32
3	Industri Pengolahan	30,545,257.41	33,293,323.39	35,547,210.57	38,473,771.09	40,407,185.25
4	Listrik dan Gas	199,763.35	233,674.85	230,439.29	256,978.89	272,646.8
5	Pengadaan Air	295,551	301,833.32	302,864.34	319,333.38	344,532.53
6	Konstruksi	26,029,528.34	27,666,601.62	29,967,277.25	31,989,277.59	34,758,351.06
7	Perdagangan	30,189,899.56	32,363,412.41	34,915,413.25	38,360,682.17	42,479,215.85
8	Transportasi & Pergudangan	8,453,792.41	8,558,706.84	9,142,461.79	9,851,277.51	10,675,509.92
9	Akomodasi	2,953,970.8	3,185,015.43	3,370,055.77	3,655,581.42	4,081,797.7
10	Informasi dan Komunikasi	13,768,375.75	14,560,090.22	15,712,599.77	16,989,305.62	18,776,936.04
11	Jasa Keuangan	7,626,124.91	8,065,153.31	8,662,536.51	9,842,958.71	10,275,003.38
12	Real Estate	7,932,616.06	8,564,509.65	9,197,417.2	9,783,666.67	10,222,293.23
13	Jasa Perusahaan	937,418.87	1,000,752.53	1,059,533.29	1,142,988.57	1,239,445.42
14	Adm. Pemerintahan	10,292,850.78	10,531,965.63	11,362,129.61	11,337,292.47	11,926,342.88
15	Jasa Pendidikan	11,918,823.01	12,473,446.88	13,378,000.09	14,295,972.24	15,685,089.35
16	Jasa Kesehatan	4,021,323.59	4,432,707.7	4,845,172.01	5,254,628.77	5,717,084.72
17	Jasa lainnya	2,736,025.92	2,943,167.2	3,207,834.73	3,522,499.25	3,859,788.33
<b>PDRB</b>		<b>217,589,132.10</b>	<b>233,988,050.61</b>	<b>250,802,993.05</b>	<b>269,423,089.13</b>	<b>288,908,616.10</b>

**Lampiran 2. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	Tahun					Rerata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.93	10.02	5.87	7.86	5.34	6.80
2	Pertambangan & Penggalian	5.68	11.11	7.42	1.22	4.52	5.99
3	Industri Pengolahan	9.22	9.00	6.77	8.23	5.03	7.65
4	Listrik dan Gas	8.04	16.98	-1.38	11.52	6.10	8.25
5	Pengadaan Air	5.50	2.13	0.34	5.44	7.89	4.26
6	Konstruksi	10.57	6.29	8.32	7.02	8.66	8.17
7	Perdagangan	7.23	7.20	7.89	9.57	10.74	8.53
8	Transportasi & Pergudangan	6.36	1.24	6.82	7.75	8.37	6.11
9	Akomodasi	6.76	7.82	5.81	8.47	11.66	8.10
10	Informasi dan Komunikasi	14.07	5.75	7.92	8.13	10.52	9.28
11	Jasa Keuangan	8.88	5.76	7.41	13.63	4.39	8.01
12	Real Estate	8.98	7.97	7.39	6.37	4.48	7.04
13	Jasa Perusahaan	6.97	6.76	5.87	7.88	8.44	7.18
14	Adm. Pemerintahan	3.07	2.32	7.88	-0.22	5.20	3.65
15	Jasa Pendidikan	7.72	4.65	7.25	6.86	9.72	7.24
16	Jasa Kesehatan	8.25	10.23	9.31	8.45	8.80	9.01
17	Jasa lainnya	7.14	7.57	8.99	9.81	9.58	8.62
<b>PDRB</b>		<b>7.62</b>	<b>7.54</b>	<b>7.19</b>	<b>7.42</b>	<b>7.23</b>	<b>7.40</b>

**Lampiran 3. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Wajo  
Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Tahun 2013-2017 (Juta Rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,908,820.66	3,204,621.32	3,358,015.56	3,648,197.74	3,864,608.61
2	Pertambangan & Penggalian	1,992,435.78	2,310,896.40	2,525,196.76	2,410,220.83	2,408,555.84
3	Industri Pengolahan	346,207.14	364,215.42	389,197.77	419,515.46	445,927.91
4	Listrik dan Gas	9,883.23	10,533.48	11,687.46	12,393.73	13,058.55
5	Pengadaan Air	3,707.95	3,856.46	3,888.28	4,019.31	4,299.06
6	Konstruksi	834,065.29	881,596.87	949,920.63	1,007,675.80	1,068,237.12
7	Perdagangan	1,428,617.33	1,542,849.38	1,651,374.25	1,799,403.77	1,947,030.05
8	Transportasi & Pergudangan	309,830.86	335,767.66	358,061.30	376,061.52	403,193.79
9	Akomodasi	31,006.42	33,637.01	35,969.64	38,734.84	41,863.46
10	Informasi dan Komunikasi	168,501.25	175,976.62	193,510.57	211,618.86	234,621.83
11	Jasa Keuangan	227,298.07	238,182.20	256,906.91	296,490.51	303,160.29
12	Real Estate	294,478.61	324,470.63	352,147.97	375,284.09	398,251.48
13	Jasa Perusahaan	10,737.63	11,435.31	12,059.67	12,995.50	14,020.85
14	Adm. Pemerintahan	392,434.46	401,875.18	432,766.04	427,360.20	447,350.24
15	Jasa Pendidikan	319,482.63	334,786.80	362,038.44	389,625.77	423,562.18
16	Jasa Kesehatan	113,801.47	125,951.45	135,599.33	146,170.03	158,813.73
17	Jasa lainnya	37,663.96	40,429.98	43,304.55	47,041.73	52,481.03
<b>PDRB</b>		<b>9,428,972.74</b>	<b>10,341,082.17</b>	<b>11,071,645.14</b>	<b>11,622,809.69</b>	<b>12,229,036.00</b>

**Lampiran 4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Kabupaten Wajo Atas Dasar Harga Konstan 2010  
Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	Tahun					Rerata
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.82	10.17	4.79	8.64	5.93	7.27
2	Pertambangan & Penggalian	2.32	15.98	9.27	-4.55	-0.07	4.59
3	Industri Pengolahan	8.14	5.20	6.86	7.79	6.30	6.86
4	Listrik dan Gas	12.83	6.58	10.96	6.04	5.36	8.35
5	Pengadaan Air	0.55	4.01	0.82	3.37	6.96	3.14
6	Konstruksi	11.96	5.70	7.75	6.08	6.01	7.50
7	Perdagangan	5.35	8.00	7.03	8.96	8.20	7.51
8	Transportasi & Pergudangan	9.56	8.37	6.64	5.03	7.21	7.36
9	Akomodasi	11.21	8.48	6.93	7.69	8.08	8.48
10	Informasi dan Komunikasi	14.64	4.44	9.96	9.36	10.87	9.85
11	Jasa Keuangan	10.71	4.79	7.86	15.41	2.25	8.20
12	Real Estate	16.33	10.18	8.53	6.57	6.12	9.55
13	Jasa Perusahaan	17.01	6.50	5.46	7.76	7.89	8.92
14	Adm. Pemerintahan	6.55	2.41	7.69	-1.25	4.68	4.02
15	Jasa Pendidikan	12.03	4.79	8.14	7.62	8.71	8.26
16	Jasa Kesehatan	12.18	10.68	7.66	7.80	8.65	9.39
17	Jasa lainnya	8.34	7.34	7.11	8.63	11.56	8.60
<b>PDRB</b>		<b>6.92</b>	<b>9.67</b>	<b>7.06</b>	<b>4.98</b>	<b>5.22</b>	<b>6.77</b>

**Lampiran 5. Hasil Perhitungan Indeks *Location Quotient* (LQ)  
Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	Tahun					Rerata	
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.45	1.42	1.41	1.45	1.49	<b>1.44</b>	(b)
2	Pertambangan & Penggalian	3.47	3.55	3.62	3.49	3.40	<b>3.51</b>	(b)
3	Industri Pengolahan	0.26	0.25	0.25	0.25	0.26	<b>0.25</b>	(nb)
4	Listrik dan Gas	1.14	1.02	1.15	1.12	1.13	<b>1.11</b>	(b)
5	Pengadaan Air	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	<b>0.29</b>	(nb)
6	Konstruksi	0.74	0.72	0.72	0.73	0.73	<b>0.73</b>	(nb)
7	Perdagangan	1.09	1.08	1.07	1.09	1.08	<b>1.08</b>	(b)
8	Transportasi & Pergudangan	0.85	0.89	0.89	0.88	0.89	<b>0.88</b>	(nb)
9	Akomodasi	0.24	0.24	0.24	0.25	0.24	<b>0.24</b>	(nb)
10	Informasi dan Komunikasi	0.28	0.27	0.28	0.29	0.30	<b>0.28</b>	(nb)
11	Jasa Keuangan	0.69	0.67	0.67	0.70	0.70	<b>0.68</b>	(nb)
12	Real Estate	0.86	0.86	0.87	0.89	0.92	<b>0.88</b>	(nb)
13	Jasa Perusahaan	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	<b>0.26</b>	(nb)
14	Adm. Pemerintahan	0.88	0.86	0.86	0.87	0.89	<b>0.87</b>	(nb)
15	Jasa Pendidikan	0.62	0.61	0.61	0.63	0.64	<b>0.62</b>	(nb)
16	Jasa Kesehatan	0.65	0.64	0.63	0.64	0.66	<b>0.65</b>	(nb)
17	Jasa lainnya	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	<b>0.31</b>	(nb)

**Lampiran 6. Hasil Perhitungan *Dynamic Location Quotient (DLQ)*  
Kabupaten Wajo Tahun 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	Rr (g)	Hasil (g)	Rr (G)	Hasil (G)	Per Kab/Prov	DLQ
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.27	1.06	6.80	0.93	1.15	<b>2.01</b> (b)
2	Pertambangan & Penggalian	4.59	0.72	5.99	0.83	0.86	<b>0.47</b> (nb)
3	Industri Pengolahan	6.86	1.01	7.65	1.03	0.98	<b>0.90</b> (nb)
4	Listrik dan Gas	8.35	1.20	8.25	1.10	1.09	<b>1.54</b> (b)
5	Pengadaan Air	3.14	0.53	4.26	0.63	0.85	<b>0.44</b> (nb)
6	Konstruksi	7.50	1.09	8.17	1.09	1.00	<b>1.01</b> (b)
7	Perdagangan	7.51	1.09	8.53	1.13	0.97	<b>0.86</b> (nb)
8	Transportasi & Pergudangan	7.36	1.08	6.11	0.85	1.27	<b>3.30</b> (b)
9	Akomodasi	8.48	1.22	8.10	1.08	1.13	<b>1.84</b> (b)
10	Informasi dan Komunikasi	9.85	1.40	9.28	1.22	1.14	<b>1.93</b> (b)
11	Jasa Keuangan	8.20	1.18	8.01	1.07	1.10	<b>1.61</b> (b)
12	Real Estate	9.55	1.36	7.04	0.96	1.42	<b>5.77</b> (b)
13	Jasa Perusahaan	8.92	1.28	7.18	0.97	1.31	<b>3.86</b> (b)
14	Adm. Pemerintahan	4.02	0.65	3.65	0.55	1.17	<b>2.19</b> (b)
15	Jasa Pendidikan	8.26	1.19	7.24	0.98	1.21	<b>2.59</b> (b)
16	Jasa Kesehatan	9.39	1.34	9.01	1.19	1.12	<b>1.76</b> (b)
17	Jasa lainnya	8.60	1.24	8.62	1.15	1.08	<b>1.47</b> (b)



**Lampiran 7. Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Kabupaten  
Wajo Tahun 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	Rasio Pertumbuhan Wilayah Referensi (RPr)						Notasi
		2013	2014	2015	2016	2017	Rerata	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.66	1.30	0.83	1.05	0.75	<b>0.92</b>	-
2	Pertambangan & Penggalian	0.76	1.43	1.03	0.17	0.64	<b>0.81</b>	-
3	Industri Pengolahan	1.19	1.18	0.95	1.10	0.71	<b>1.03</b>	+
4	Listrik dan Gas	1.05	2.07	-0.21	1.49	0.85	<b>1.05</b>	+
5	Pengadaan Air	0.74	0.30	0.05	0.75	1.08	<b>0.58</b>	-
6	Konstruksi	1.35	0.84	1.15	0.91	1.18	<b>1.09</b>	+
7	Perdagangan	0.95	0.96	1.09	1.30	1.44	<b>1.15</b>	+
8	Transportasi & Pergudangan	0.85	0.17	0.95	1.04	1.14	<b>0.83</b>	-
9	Akomodasi	0.89	1.04	0.82	1.13	1.55	<b>1.09</b>	+
10	Informasi dan Komunikasi	1.74	0.78	1.09	1.09	1.41	<b>1.22</b>	+
11	Jasa Keuangan	1.15	0.78	1.03	1.74	0.62	<b>1.06</b>	+
12	Real Estate	1.16	1.05	1.03	0.87	0.64	<b>0.95</b>	-
13	Jasa Perusahaan	0.92	0.90	0.83	1.06	1.15	<b>0.97</b>	-
14	Adm. Pemerintahan	0.42	0.32	1.09	-0.03	0.73	<b>0.51</b>	-
15	Jasa Pendidikan	1.01	0.63	1.01	0.93	1.31	<b>0.98</b>	-
16	Jasa Kesehatan	1.08	1.32	1.27	1.13	1.20	<b>1.20</b>	+
17	Jasa lainnya	0.94	1.00	1.23	1.29	1.30	<b>1.15</b>	+

*Lanjutan tabel 7.*

No.	Lapangan usaha	Rasio Pertumbuhan Wilayah Studi (RPs)						Notasi
		2013	2014	2015	2016	2017	Rerata	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.99	1.05	0.69	1.68	1.13	<b>1.11</b>	+
2	Pertambangan & Penggalan	0.35	1.56	1.29	-1.01	-0.01	<b>0.44</b>	-
3	Industri Pengolahan	1.16	0.56	0.97	1.52	1.19	<b>1.08</b>	+
4	Listrik dan Gas	1.76	0.70	1.50	1.20	1.03	<b>1.24</b>	+
5	Pengadaan Air	0.08	0.44	0.12	0.69	1.31	<b>0.53</b>	-
6	Konstruksi	1.65	0.61	1.09	1.21	1.14	<b>1.14</b>	+
7	Perdagangan	0.79	0.84	1.00	1.73	1.53	<b>1.18</b>	+
8	Transportasi & Pergudangan	1.35	0.88	0.94	1.01	1.36	<b>1.11</b>	+
9	Akomodasi	1.56	0.89	0.98	1.51	1.51	<b>1.29</b>	+
10	Informasi dan Komunikasi	1.97	0.48	1.37	1.80	1.98	<b>1.52</b>	+
11	Jasa Keuangan	1.50	0.52	1.10	2.82	0.44	<b>1.28</b>	+
12	Real Estate	2.17	1.05	1.19	1.30	1.16	<b>1.37</b>	+
13	Jasa Perusahaan	2.25	0.69	0.78	1.52	1.48	<b>1.34</b>	+
14	Adm. Pemerintahan	0.95	0.27	1.08	-0.27	0.90	<b>0.59</b>	-
15	Jasa Pendidikan	1.66	0.52	1.14	1.49	1.62	<b>1.29</b>	+
16	Jasa Kesehatan	1.68	1.09	1.08	1.53	1.61	<b>1.40</b>	+
17	Jasa lainnya	1.19	0.78	1.01	1.68	2.09	<b>1.35</b>	+

**Lampiran 8. Hasil Analisis Overlay Kabupaten Wajo  
Tahun 2013-2017**

No.	Lapangan usaha	RPr		RPs		LQ		Overlay
		Nilai	Notasi	Nilai	Notasi	Nilai	Notasi	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,92	-	1,11	+	1,44	+	- + +
2	Pertambangan & Penggalian	0,81	-	0,44	-	3,51	+	- - +
3	Industri Pengolahan	1,03	+	1,08	+	0,25	-	+ + -
4	Listrik dan Gas	1,05	+	1,24	+	1,11	+	+ + +
5	Pengadaan Air	0,58	-	0,53	-	0,29	-	- - -
6	Konstruksi	1,09	+	1,14	+	0,73	-	+ + -
7	Perdagangan	1,15	+	1,18	+	1,08	+	+ + +
8	Transportasi dan Pergudangan	0,83	-	1,11	+	0,88	-	- + -
9	Akomodasi	1,09	+	1,29	+	0,24	-	+ + -
10	Informasi dan Komunikasi	1,22	+	1,52	+	0,28	-	+ + -
11	Jasa Keuangan	1,06	+	1,28	+	0,68	-	+ + -
12	Real Estate	0,95	-	1,37	+	0,88	-	- + -
13	Jasa Perusahaan	0,97	-	1,34	+	0,26	-	- + -
14	Adm. Pemerintahan	0,51	-	0,59	-	0,87	-	- - -
15	Jasa Pendidikan	0,98	-	1,29	+	0,62	-	- + -
16	Jasa Kesehatan	1,20	+	1,40	+	0,65	-	+ + -
17	Jasa lainnya	1,15	+	1,35	+	0,31	-	+ + -



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI & BISNIS ISLAM**

Kampus I Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923 Kampus II Jl.H.M. Yasin  
Limpo No.36 Samata – Gowa Tlp. 424835 Fax. 424836

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi  
Fakultas ekonomi & Bisnis islam  
Universitas Islam Negeri Alauddin  
Di\_  
Tempat

Acc  
tgl 10-1-2019  
HS

Assalamu Alaikum Wr.Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ashabul Kahfi Muhrisya  
NIM : 90300115003  
Fak/ Jurusan : Ekonomi dan bisnis islam/Ilmu Ekonomi  
Semester : Tujuh (VII)

*Penyembul*  
*Prof. Dr. H. Mukhlis Lutfi, M.Pd.*  
*Dr. Wardiana Sabar, S.Pd, M.Si*  
*ng 13*

Dengan ini mengajukan judul skripsi sebagai berikut :

1. Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)
2. Analisis Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan)
3. Analisis Pengaruh Investasi Pemerintah dan Investasi Swasta Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja (Studi Kasus di Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan)

*rahman / auri / Wardiana*

Demikian permohonan ini untuk dipertimbangkan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

*Buabek smpn*  
*31/1/19*

Gowa, 9 Januari 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

Yang Bermohon

**Dr. Siradjuddin, S.E., M.Si**  
NIP. 19660509 200501 1003

**Ashabul Kahi Muhrisya**  
NIM. 90300115003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**Nomor : 198 Tahun 2019**

**T E N T A N G**

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : a Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Ashabul Kahfi Muhrisyah, Nim: 90300115003** tertanggal 31-01-2019 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: **"Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Dan sektor Unggulan Ekonomi Di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi Dan Daya Saing Ekonomi)"**
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk disertai tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Prof.Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd
2. Wardihan Sabar, S.Pd.,M.Si
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 6 Februari 2019  
Dekan,





### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal yang berjudul “**Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)**” yang disusun oleh Ashabul Kahfi Muhrisyah, NIM: 90300115003, Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang bersangkutan memandang bahwa proposal telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di seminarkan. Demikian persetujuan ini diberi untuk diproses lebih lanjut.

Samata, 30 JULI 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd  
NIP: 19640706 199103 1 003

  
Wardihan Sabar, S.Pd., M.Si  
NIP : 19870522 201903 1 005

Nomor : 3269 / EB.I/PP.00.9/8/2019

Samata, 18 September 2019

Lampiran : -

Hal : Undangan Seminar Proposal  
A.n. Ashabul Kahfi Muhrisya/90300115003

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing, untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing dan penguji pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal	: Kamis, 19 September 2019
Waktu	: 08.30 -12.00 WITA
Judul Skripsi	: Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)
Tempat	: Ruang Seminar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1530 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Ashabul Kahfi Muhrisya, NIM : 90300115003  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Ashabul Kahfi Muhrisya**, NIM: **90300115003** tertanggal 05 Agustus 2019 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul: "**Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)**".
- Menimbang** : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi  
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.  
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
**Sekretaris** : Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.  
**Pembimbing II** : Wardihan Sabar, SE.,M.Pd.  
**Penguji I** : Dr. H. Abd. Wahab, SE.,M.Si.  
**Penguji II** : Dr. Syaharuddin, M.Si.  
**Pelaksana** : Ismunandar, S.Kom.
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi  
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 22 Agustus 2019  
Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam





**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 1947 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Ashabul Kahfi Muhrisyah** : NIM: 90300115003
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- |  |  |
|--|--|
| <b>Ketua</b>                                       | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. |
| <b>Sekretaris</b>                                  | : Dr. Hasbiullah, SE., M.Si.                   |
| <b>Penguji Dirasah Islamiyah</b>                   | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.            |
| <b>Penguji Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan</b> | : Akramunnas, SE., M.Si.                       |
| <b>Penguji</b>                                     | : Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.                  |
| <b>Pelaksana</b>                                   | : Hasanuddin                                   |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.  
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 25 September 2019

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip



Nomor : **4477** /EB.I/PP.00.9/9/2019

Gowa, **24** . September 2019

Sifat : Penting

Lampiran: -

Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada,

**Yth. UPT P2T BKPM**

Di,-

Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : **Ashabul Kahfi Muhrisya**

NIM : 90300115003

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Semester : IX (Sembilan)

Alamat : Perintis Kemerdekaan III, Perumahan Green Hasanuddin Blok B1 No. 2

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

**“Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo  
(Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)”**

Dengan Dosen pembimbing: **1. Prof. Dr. H. Mukhtar Lutfi, M.Pd.**

**2. Wardihan Sabar, S.E., M.Si.**

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di **BPS Wajo**.

Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UIN Alauddin Makassar,**



**Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.**

**NIP. 19661130 199303 1 003**





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN**

Nomor : 23571/S.01/PTSP/2019  
 Lampiran :  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.  
 Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Wajo

di-  
**Tempat**

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4477/EB.VPP.00.0/9/2019 tanggal 24 September 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ASHABUL KAHFI MUHRISYA**  
 Nomor Pokok : 90300115003  
 Program Studi : Ilmu Ekonomi  
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)  
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

**" ANALISIS POTENSI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN SEKTOR UNGGULAN EKONOMI DI KABUPATEN WAJO (PENDEKATAN MODEL BASIS EKONOMI DAN DAYA SAING EKONOMI) "**

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 27 September s/d 27 Desember 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
 Pada tanggal : 26 September 2019

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU**  
**PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

**M A K A S S A R**

**A. M. YAMIN, SE., MS.**  
 Pangkat : Pembina Utama Madya  
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar;
2. Pertinggal.







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923  
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : **5945** /EB.1/PP.00.9/11/2019  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samata, 6 November 2019

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-  
Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Ashabul Kahfi Muhrisya  
NIM : 90300115003  
Jurusan : ILMU EKONOMI  
Judul Skripsi : Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 07 November 2019  
Waktu : 14.00 - 15.00 WITA  
Tempat : Ruang Seminar

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003





KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2404 TAHUN 2019

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA  
A.n.Ashabul Kahfi Muhrisya, NIM : 90300115003  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Ashabul Kahfi Muhrisya, NIM: 90300115003** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;  
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **ILMU EKONOMI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

**Ketua** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
**Sekretaris** : Dr. Siradjuddin, SE., M.Si.  
**Pembimbing** : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.  
**Pembimbing II** : Wardihan Sabar, SE., M.Pd.  
**Penguji I** : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.  
**Penguji II** : Dr. Syaharuddin, M.Si.  
**Pelaksana** : Siti Rifqah Wiranti, SE.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

- Kedua : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa  
Pada tanggal : 05 November 2019

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.  
NIP. 19661130 199303 1 003



Nomor : *646* /EB.1/PP.00.9/11/2019  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, 12 November 2019

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing  
Di-

Makassar

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Ashabul Kahfi Muhrisya  
NIM : 90300115003  
Jurusan : ILMU EKONOMI  
Judul Skripsi : "Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 13 November 2019  
Waktu : 09.00 - 12.00 Wita  
Tempat : Ruang Seminar

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Wassalam

Kuasa Dekan

Nomor : 6111/EB.1/Kp.07/11/2019

Tanggal: 11 November 2019

Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.

NIP. 19730525 200801 1 017







ALAUDDIN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
NOMOR : 2677 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH  
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

- Membaca : Surat permohonan : **Ashabul Kahfi Muhrisyah**  
NIM : **90300115003**  
Tanggal : **08 November 2019**  
Mahasiswa Jurusan : **ILMU EKONOMI**  
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Ekonomi di Kabupaten Wajo (Pendekatan Model Basis Ekonomi dan Daya Saing Ekonomi)**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah  
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;  
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;  
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar  
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;  
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).  
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.**  
**Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.**  
**Penguji I : Dr. H. Abd. Wahab, SE., M.Si.**  
**Penguji II : Dr. Syaharuddin, M.Si.**  
**Pembimbing I : Prof. Dr. Mukhtar Lutfi, M.Pd.**  
**Pembimbing II : Wardihan Sabar, SE., M.Pd.**  
**Pelaksana : Sitti Rifqah Wiranti, SE.**
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.  
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.  
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : **Samata-Gowa**  
Pada tanggal : **12 November 2019**

Kuasa Dekan

Nomor : **6111/EB.1/Kp.07/11/2019**  
Tanggal : **11 November 2019**



**Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak**  
NIP. 19730525 200801 1 017



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Ashabul Kahfi Muhrisya. Lahir di Makassar pada tanggal 27 Juli 1997. Anak ke-3 dari 3 bersaudara, penulis memiliki 1 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki, terlahir dari pasangan Drs. Syarifuddin Hasan dan Drg. Nur Asri Idrus M.Kes. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal dari SD Negeri 4 Maddukkelleng pada tahun 2003, kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah tingkat pertama di SMP Negeri 6 Sengkang Unggulan Kabupaten Wajo pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan jenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 3 Sengkang

Unggulan Kabupaten Wajo pada tahun 2012 hingga tahun 2015. Pada tahun yang sama melalui jalur SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) hingga akhirnya penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar program strata satu (S1).